

**PENGGUNAAN INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN
ANGGARAN (IKPA) SEBAGAI SARANA PENGUKURAN
KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN SATUAN KERJA
(Studi Kasus Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Langsa)**

SKRIPSI

Oleh:

SHEILA DWI TIARA
NIM. 4022018018

Program Studi
EKONOMI SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2023 M / 1444 H**

**PENGGUNAAN INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN
ANGGARAN (IKPA) SEBAGAI SARANA PENGUKURAN
KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN SATUAN KERJA
(Studi Kasus Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Langsa)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)**

Oleh:

**Sheila Dwi Tiara
NIM. 4022018018**



**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2023 M / 1444 H**

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**PENGGUNAAN INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN
(IKPA) SEBAGAI SARANA PENGUKURAN KINERJA
PENGELOLAAN KEUANGAN SATUAN KERJA
(Studi Kasus Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Langsa)**

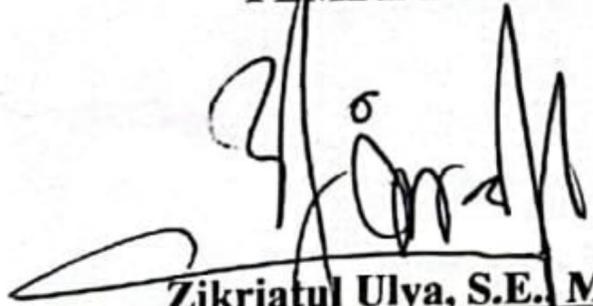
Oleh :

SHEILA DWI TIARA
NIM: 4022018018

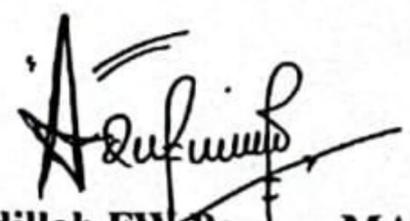
Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Pada Program Studi Ekonomi Syariah

Disetujui Oleh :

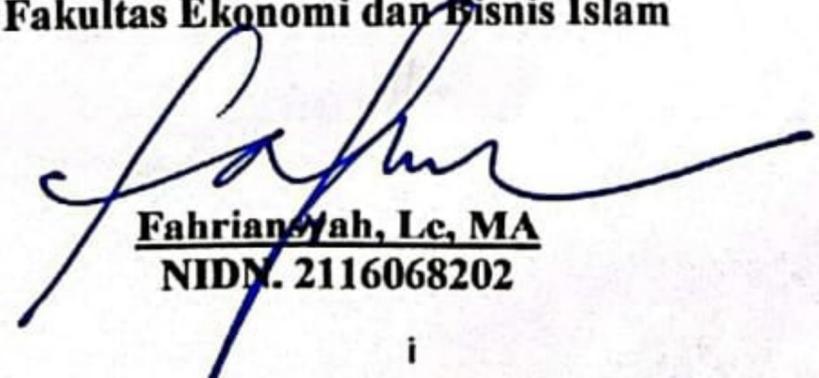
PEMBIMBING I


Zikriatul Ulva, S.E., M.Si
NIDN. 2024029102

PEMBIMBING II


Ade Fadillah FW Pospos, MA
NIP. 19880407 201903 2 010

Mengetahui
Ketua Jurusan Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Fahriansyah, Lc, MA
NIDN. 2116068202

PENGESAHAN

Skripsi berjudul "Penggunaan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sebagai Sarana Pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja (Studi Kasus Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Langsa)" an Shelia Dwi Tiara, NIM 4022018018 program Studi Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 1 Februari 2023. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada program studi Ekonomi Syariah

Langsa, 06 Februari 2023

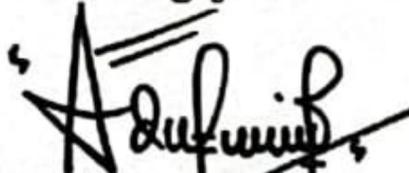
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Langsa

Ketua/ Penguji I


Zikriatul Ulva, S.E., M.Si.
NIDN.2024029107

Sekretaris/ Penguji II


Ade Fadillah Fy. Posjos, M.A
NIP. 198807407 201903 2 010

Anggota/ Penguji III


Dr. Amiruddin Yahya, MA
NIP.19750909 200801 1 013

Anggota/ Penguji IV


Zulfa Elza, S.E., M.S.i
NIDN.2003048502

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

IAIN Langsa



Prof. Dr. Iskandar, M.CI

NIP. 19650616 199503 1 002

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Sheila Dwi Tiara**
NIM : 4022018018
Fakultas : FEBI
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Penggunaan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sbagai Sarana Pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja (Studi Kasus Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Langsa).

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini benar-benar saya kerjakan sendiri. Skripsi ini bukan merupakan plagiarisme, pencurian hasil karya milik orang lain, hasil kerja orang lain untuk kepentingan saya karena hubungan material maupun non – material, ataupun segala kemungkinan lain yang pada hakekatnya bukan merupakan Skripsi saya secara orisinal dan otentik.

Bila kemudian hari diduga kuat ada ketidaksesuaian antara fakta dengan kenyataan ini, saya bersedia diproses oleh tim Fakultas yang dibentuk untuk melakukan verifikasi, dengan sanksi terberat berupa pembatalan kelulusan/kesarjanaan.

Pernyataan ini saya buat dengan kesadaran sendiri dan tidak atas tekanan ataupun paksaan dari pihak maupun demi menegakan integritas akademik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.

Langsa, 12 Januari 2023

Yang Menyatakan



1000
REPUBLIK INDONESIA
METERAI TEMPEL
D48AKX191679553

Sheila Dwi Tiara

NIM. 4022018018

Abstrak

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah peraturan yang dibuat oleh Kementerian Keuangan selaku BUN sebagai alat pengukur pelaksana kinerja. Penggunaan IKPA adalah salah satu bentuk pola perubahan pemikiran bahwa kinerja pelaksanaan anggaran bukan hanya dinilai dari penyerapan anggarannya tapi juga mengingat pada saat ini banyak aspek kinerja pelaksanaan anggaran yang tersedia dalam database pelaksanaan anggaran yang relevan untuk dijadikan bahan evaluasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana dan faktor-faktor apa saja yg mempengaruhi penggunaan IKPA sebagai sarana pengukuran kinerja pengelolaan keuangan satker di KPPN Langsa. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian ini dapat menguraikan tentang bahwa Penggunaan IKPA sebagai sarana pengukuran kinerja pengelolaan keuangan satker menggunakan Aplikasi OM-SPAN sebagai alat monitoring/memantau kinerja satker dan Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penggunaan IKPA sendiri masih berkaitan dengan Aplikasi OM-SPAN.

Kata Kunci: Penggunaan IKPA, Kinerja, Satker, OM-SPAN.

Abstract

Budget Implementation Performance Indicators (IKPA) are regulations made by the Ministry of Finance as BUN as a measuring tool for implementing performance. The use of IKPA is a form of changing the mindset that the performance of budget implementation is not only assessed from the absorption of the budget but also considering that currently many aspects of budget implementation performance are available in the relevant budget implementation database to be used as evaluation material. This study aims to find out how and what factors influence the use of IKPA as a means of measuring the performance of financial management work units at KPPN Langsa. The research method used is a qualitative method with data collection techniques are interviews, documentation, and observation. The results of this study can describe that the use of IKPA as a means of measuring the performance of financial management of the satker uses the OM-SPAN application as a tool for monitoring/monitoring the performance of the satker and the factors that influence the use of IKPA itself are still related to the OM-SPAN application.

Keywords: Use of IKPA, Performance, Satker, OM-SPAN.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh

Puji dan syukur yang tak terhingga saya sebagai penyusun panjatkan atas berkah dari Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam tidak lupa penyusun ucapkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memperjuangkan kehidupan umatnya sehingga umatnya saat ini dapat merasakan indahnya Islam sebagai agama untuk membawa kebahagiaan dunia dan akhirat.

Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada program studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka dengan itu penulis menulis skripsi yang berjudul "**Penggunaan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sebagai Sarana Pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja (Studi Kasus Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Langsa)**"

Upaya penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik moral maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT Yang Maha Esa yang selalu memberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Untuk kedua Orangtua tercintai Ayahanda Alm. Iskandar dan Ibunda Sulastri yang tiada hentinya memberikan semangat dan dukungan serta doa yang tulus kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, M.A. selaku rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa.
4. Dr. Iskandar, M.C.L. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa.
5. Dr. Fahriansah, Lc., M.A. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa.
6. Zikriatul Ulya, M.Si sebagai pembimbing I yang telah dengan tulus membantu dan membimbing saya hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

7. Ade Fadillah FW Pospos, MA sebagai pembimbing II yang telah dengan tulus membantu, memberikan semangat dan membimbing saya hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Terima kasih kepada Kakak saya Aprilisa Astri S.Pd yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini serta kepada abang ipar saya Rahmad Kurniawan S.ST yang telah meminjamkan Laptop nya dari awal penulisan hingga skripsi ini selesai.
9. Terima kasih kepada teman seperjuangan saya Indah Kurnia Putri BatuBara dan Zahratun Nisa telah membantu, memberikan semangat yang luar biasa, memotivasi untuk lulus bersama dan berjuang bersama dari awal penulisan hingga skripsi ini selesai.
10. Terima kasih kepada sahabat saya Dena Sulistyia dan Diva Mawarni yang telah memberikan semangat, doa dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
11. Terima kasih juga kepada Prada Roni Amrian Ginting telah memberikan semangat yang luar biasa, doa dan dukungan serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Terima Kasih juga kepada seluruh teman EKS angkatan 2018 Unit 1 teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu untuk waktu kebersamaan kita selama menempuh studi di IAIN Langsa dan telah banyak membantu saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan ganjaran yang terbaik dari Allah SWT. Selain itu, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, kritik yang membangun serta saran-saran yang bermanfaat sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi khasanah ilmu ekonomi islam untuk kita yang membaca.

Wassalamualaikum Warahmatullalahi Wabarakatuh.

Langsa, 19 Januari 2023

**Sheila Dwi Tiara
NIM 4022018018**

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	
PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN ANTI PLAGIASI	
ABSTRAKS (Bahasa Indonesia)	i
ABSTRACT (Bahasa Inggris)	ii
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah.	6
1.3. Batasan Masalah.....	7
1.4. Rumusan Masalah	7
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.5.1. Tujuan Penelitian.....	7
1.5.2. Manfaat Penelitian.....	8
1.6. Penjelasan Istilah.....	8
1.7. Sistematika Pembahasan	9
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).....	11
2.1.1. Pengertian IKPA.....	11
2.1.2. Bobot Indikator IKPA.	12
2.1.3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).	18
2.1.4. OM SPAN	19
2.1.5. Manfaat IKPA Bagi KPPN.....	20
2.2. Kinerja.....	22
2.2.1. Pengertian Kinerja.....	22
2.2.2. Indikator Kinerja.	23
2.2.3. Pengukuran Kinerja.....	26
2.2.4. Penganggaran Berbasis Kinerja.....	30
2.3. Satuan Kerja (Satker).	32
2.3.1. Pengertian Satuan Kerja	32
2.3.2. Pengelolaan Keuangan Satker	34
2.4. Penelitian Terdahulu	34
2.4. Kerangka Teori.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Pendekatan Penelitian	41
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	41
3.3. Subjek Penelitian.....	42
3.4. Sumber Data Penelitian.....	42
3.5. Instrumen Pengumpulan Data.	43
3.5.1. Metode Wawancara	43
3.5.2. Metode Dokumentasi	44

3.5.3. Observasi	44
3.6. Analisa Data	44
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
4.1. Gambaran Objek Penelitian	47
4.1.1. Sejarah Singkat KPPN Langsa	47
4.1.2. Visi, Misi, Dan Tujuan KPPN Langsa	48
4.1.3. Struktur Organisasi KPPN Langsa	49
4.1.4. Uraian Tugas dan Fungsi Tanggungjawab	56
4.2. Penggunaan IKPA Sebagai Sarana Pengukuran Kinerja Pengelola Keuangan KPPN Langsa	58
4.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan IKPA Sebagai Sarana Pengukuran Kinerja Pengelola Keuangan Satker di KPPN Langsa	61
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	71
5.2. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN – LAMPIRAN	75

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kinerja instansi pemerintah merupakan gambaran pencapaian tujuan atau sasaran instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi yang mengartikulasikan kegiatan operasionalnya sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Kinerja dalam instansi pemerintah dapat diartikan sebagai efisiensi yang dicapai oleh pegawai pemerintah atau instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Pengukuran dan evaluasi kinerja memegang peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian untuk memastikan fungsi operasional organisasi berjalan dengan baik, karena pengukuran dan evaluasi kinerja merupakan alat untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.¹

Instansi pemerintah yang berperan dalam rangka pelaksanaan anggaran pemerintah pusat adalah Satuan Kerja (Satker), di masing-masing Kementerian Negara/Lembaga dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku instansi vertikal Kementerian Keuangan. Peran satuan kerja (Satker) sebagai instansi pada

¹Ikhwani Ratna, Hidayati Nasrah, “Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.” dalam *Kutubkhanah: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*., Vol. 19, No. 1, (Januari-Juni 2016), h. 62.

kementerian atau lembaga yang melaksanakan program kegiatan yang didalamnya berisi kegiatan-kegiatan dan memiliki kewenangan penggunaan anggaran.²

Dalam pembiayaan untuk menjalankan kegiatannya, unit kerja harus berpedoman pada biaya atau anggaran yang mengacu pada dokumen resmi berupa Petunjuk Operasional Kerja (POK). Kekuatan untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran dilakukan oleh kementerian Keuangan melalui pembuatan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Melalui IKPA dengan indikator kinerja sebagai alat ukur kinerja pelaksanaan anggaran, dapat dilihat sejauh mana perubahan perilaku dalam pengelolaan keuangan negara. Perubahan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dapat dilihat sebagai kualitas pelaksanaan anggaran, kualitas perencanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.³

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang memperoleh kewenangan sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (Kuasa BUN).⁴

KPPN Langsa merupakan salah satu Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan di bawah Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh. KPPN Langsa, bertujuan mewujudkan pengelolaan perbendaharaan negara

²Badi'ul Choir, "Pelaksanaan Pembayaran Dana Gaji Sususlan Satuan Kerja Pada KPPN Kab.Banyuwangi" dalam *Laporan Praktek Kerja Nyata*, (2018), h. 10.

³Teddy B. Tampubolon, "Tinjauan Atas Hasil Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pada Kppn Medan I Tahun 2020 Dan 2021". (Skripsi, Program D3 Kebendaharaan Negara Pkn Stan, 2022), h. 16.

⁴Mirna Wita, Rusdi. "Analisis Perhitungan Kinerja Dengan Mekanisme IKPA Terhadap Kepuasan dan Kinerja Satker Pada KPPN Meulaboh" dalam *Jurnal Riset Ekonomi*, Vol.1 No.3 November (2021), h. 255.

yang profesional, transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan pemerintahan.

Terbitnya UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara membuat Pemerintah Indonesia untuk menganut anggaran berbasis kinerja. Dalam pelaksanaannya, membantu dalam mensosialisasikan UU No.1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara dan peraturan terkait lainnya. Penyusunan anggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*) ditentukan oleh satuan kerja, dengan mempertimbangkan beban kerja dan *unit cost* setiap kegiatan.⁵

Tujuan dan hasil dari pelaksanaan anggaran tertuang dalam bentuk indikator kinerja dan terdapat penyusunan anggaran yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut melalui informasi kinerja yang ada. Peningkatan kinerja anggaran Kementerian/Lembaga pada tahun anggaran 2022 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya tentu saja tidak dapat dipisahkan dari upaya Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dalam mengawal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Upaya secara nyata adalah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga.⁶

Selain melaksanakan peran sebagai kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) juga sebagai mitra satuan

⁵Reza Nanda, Darwanis, “Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Daerah” dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, Vol.1, No.1 (2016), h. 328.

⁶Indra Kusuma (Kepala Seksi PDMS KPPN Tarakan), “Mengeliminasi Kelaziman Permasalahan Anggaran Dengan IKPA” (Tarakan: 16 maret 2021)

kerja dalam melaksanakan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran pada satuan kerja, dengan menggunakan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). IKPA sendiri merupakan indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap kualitas pelaksanaan anggaran, kualitas perencanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.⁷

Penggunaan IKPA merupakan salah satu bentuk pola perubahan pemikiran tentang implementasi kinerja anggaran, tidak hanya ulasan dari penyerapan anggaran, tetapi juga berpikir saat ini banyak anggaran pelaksanaan yang tersedia dalam wadah informasi pelaksanaan anggaran yang relevan untuk dijadikan bahan evaluasi.⁸ IKPA terintegrasi pada Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) yang kemudian digunakan sebagai alat ukur kinerja satuan kerja atas kualitas pelaksanaan anggaran, kualitas perencanaan anggaran, dan kualitas asil pelaksanaan anggaran.⁹

Pengukuran kinerja pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh satker tidak hanya dari besarnya penyerapan anggaran saja. Terdapat 8 indikator yang digunakan

⁷Lesmana Chandra B., Nanang Widiatmoko, “Pengaruh Kepatuhan Satker Pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terhadap Penyaluran Dukungan Anggaran Binopslat” dalam *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Krisnadwipayana*, Vol.7. No. 3 September-Desember (2019), h. 2.

⁸Mirna Wita, Rusdi. “Analisis Perhitungan Kinerja Dengan Mekanisme IKPA Terhadap Kepuasan dan Kinerja Satker Pada KPPN Meulaboh” dalam *Jurnal Riset Ekonomi*, Vol.1 No.3 November (2021), h. 256.

⁹Teddy B. Tampubolon, “Tinjauan Atas Hasil Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pada Kppn Medan I Tahun 2020 Dan 2021”. (Skripsi, Program D3 Kebendaharaan Negara Pkn Stan, 2022), h. 16.

untuk mengukur kinerja tersebut. Pada pertengahan tahun 2022 terdapat perubahan pada indikator serta bobotnya, yang sebelumnya memiliki 13 indikator lalu diperkecilkan menjadi 8 indikator saja. Ke-8 indikator tersebut, menggambarkan kinerja satker dari aspek kualitas pelaksanaan anggaran, kualitas perencanaan anggaran, dan kualitas asil pelaksanaan anggaran.¹⁰

Gambar.1.1. Tabel Indikator serta bobot IKPA

$$\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^8 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) : \text{Konversi Bobot}$$

No.	ASPEK KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN 20%	No.	ASPEK KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN 55%	No.	ASPEK KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN 25%
1.	Revisi DIPA (10%)	1.	Penyerapan Anggaran (20%)	1.	Capaian Output 25%
2.	Deviasi Halaman III DIPA (10%)	2.	Data Kontrak (10%)		
		3.	Penyelesaian Tagihan (10%)		
		4.	Pengelolaan UP dan TUP (10%)		
		5.	Dispensasi SPM (5%)		

- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Es I/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- Konversi bobot bernilai di bawah 100% apabila pada Satker/Es I/K/L tidak terdapat data transaksi untuk Satker tertentu

Sumber: djpb.kemenkeu.go.id/

Penggunaan IKPA digunakan sebagai bahan monitoring untuk memantau kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Capaian IKPA menggambarkan kinerja para pejabat

¹⁰Wakista Fitri A., Kepala Seksi Verifikasi dan Akutansi, wawancara di KPPN Langsa, tanggal 15 Desember 2022.

perbendaharaan dalam pelaksanaan anggaran ditingkat satker. Namun, nyatanya kebijakan ini tidak berjalan seperti yang diharapkan, permasalahan tersebut berimplikasi pada belum maksimalnya penggunaan IKPA. Pengukuran kinerja dengan IKPA untuk kelancaran pelaksanaan anggaran serta meningkatkan kualitas kinerja satker belum sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, Penggunaan IKPA ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan.

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan Judul **Penggunaan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sebagai Sarana Pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja (Studi Kasus Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Langsa)**

1.2. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, dapat diidentifikasi permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. IKPA sebagai mitra dalam evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran pada Satker
2. IKPA merupakan indikator untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga
3. IKPA digunakan sebagai bahan monitoring untuk memantau dan mengevaluasi efektifitas pelaksanaan anggaran
4. Penggunaan IKPA salah satu bentuk perubahan pemikiran tentang implementasi kinerja anggaran
5. Terdapat 8 indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pengelola keuangan yang dilakukan oleh Satker.

1.3. Batasan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang maka penulis perlu membatasi masalah agar lebih terfokus dan tidak melebar kemana-mana. Oleh karena itu, penulis hanya memfokuskan penelitian ini pada penggunaan indikator kinerja pelaksanaan anggaran sebagai sarana pengukuran kinerja pengelolaan keuangan satuan kerja di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Langsa.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penggunaan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dalam mengukur kinerja pengelolaan keuangan Satuan Kerja (SATKER) di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Langsa?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi penggunaan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dalam mengukur kinerja pengelolaan keuangan Satuan Kerja (Satker) di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Langsa?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan untuk penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui penggunaan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebagai sarana pengukuran kinerja pengelolaan keuangan Satuan Kerja (Satker) di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Langsa.

- 2) Untuk mengetahui apa saja yang mempengaruhi penggunaan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebagai sarana pengukuran kinerja pengelolaan keuangan Satuan Kerja (Satker) di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Langsa.

1.5.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat untuk penelitian ini adalah :

- 1) Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti dalam proses penelitian dan penulisan skripsi, serta mengaplikasikan teori-teori yang telah penulis peroleh selama menempuh studi di perguruan tinggi.
- 2) Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi pihak KPPN Langsa yang berkaitan dengan penggunaan IKPA sebagai sarana pengukuran kinerja pengelolaan satker.

1.6. Penjelasan Istilah

1. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

IKPA merupakan indikator yang ditetapkan Kementerian Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran belanja oleh seluruh Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan sesuai regulasi (PMK nomor 195/PMK.05/2018).¹¹

¹¹Sodikin, "An Analysis Of Budget Implementation Performance Measurement Using IKPA" dalam *Journal of Education, Administration, Training, and Religion*, vol.2 No.2 (2021), h. 26.

2. Kinerja

Kinerja, *performance* atau prestasi kerja merupakan penampilan kerja maupun hasil yang dicapai seseorang, baik berupa barang/produk maupun dalam bentuk jasa, yang biasanya digunakan sebagai dasar penilaian diri karyawan atau organisasi kerja yang bersangkutan yang mencerminkan pengetahuan karyawan tentang pekerjaannya. Semakin tinggi kualitas dan kuantitas hasil kerjanya maka semakin tinggi kinerjanya.¹²

3. Satuan Kerja (Satker)

Satuan Kerja merupakan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.¹³

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan merupakan suatu susunan untuk mempermudah dalam mengarahkan penulisan agar tidak mengarah pada hal-hal yang tidak berhubungan dengan masalah yang hendak diteliti.

BAB I, merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat masalah penelitian, penjelasan istilah, dan sistematika pembahasan.

¹²Akhmad Fauzi dan Rusdi Hidayat N.A., *Manajemen Kinerja*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2020), h. 2.

¹³Swante Adi Krisna, "Pengertian Satuan Kerja", hukum.iknusanantara.com/satuan-kerja. Diunduh 23 Juni 2022.

BAB II, pembahasan berikutnya merupakan sebuah landasan teori yang terdiri dari beberapa sub bahasan, yaitu mengenai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), Kinerja, dan Satuan Kerja (Satker).

BAB III, pembahasan tentang pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek penelitian, sumber data penelitian, instrument pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV, bab ini menguraikan deskripsi objek penelitian yang relevan dengan masalah yang diteliti, juga menguraikan tentang Penggunaan IKPA sebagai sarana pengukuran kinerja pengelolaan keuangan satker KPPN Langsa.

BAB V, penutup dari semua rangkain penelitian meliputi kesimpulan dari seluruh pembicaraan sebelumnya serta beberapa saran jika dianggap perlu.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

2.1.1. Pengertian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran.¹⁴ IKPA merupakan bentuk informasi kinerja yang berguna bagi pegawai pemerintah pusat untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang benar tentang perbaikan organisasi. Meskipun informasi kinerja dapat digunakan dalam berbagai cara, tujuan akhir yang diharapkan berupa peningkatan kinerja organisasi.¹⁵

Pengertian Indikator Kinerja sebagai tolok ukur yang digunakan untuk menentukan derajat kemakmuran organisasi untuk menggapai visi misi, hal yang perlu digunakan untuk menilai suatu kinerja adalah dengan indikator karena suatu kinerja secara empiris tentang suatu keadaan yang dapat dideskripsikan secara tersirat maupun tersurat, maka indikator pada suatu kinerja akan berfungsi sebagai alat yang dapat memberikan gambaran atau penilaian mengenai kondisi tersebut, dari situ garis

¹⁴Sodikin, "An Analysis Of Budget Implementation Performance Measurement Using IKPA" dalam *Journal of Education, Administration, Training, and Religion*, vol.2 No.2 (2021), h. 26.

¹⁵Agus Bayu Santoso, "Penggunaan Informasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga" dalam *Accounting and Business Information Systems Journal*, vol.9 No.4(2021), h. 1.

besar Indikator kinerja yang digunakan merupakan alat yang digunakan untuk menjelaskan mengenai suatu kondisi.¹⁶

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ini merupakan *instrumen* yang disusun dalam rangka melaksanakan fungsi *monitoring* dan evaluasi anggaran. IKPA dianggap memiliki efektivitas dalam menghitung kinerja pelaksanaan anggaran suatu satker. KPPN Langsa selaku satker memiliki kewajiban untuk melakukan monitoring dan evaluasi anggaran belanja paling sedikit satu kali dalam setiap triwulannya.¹⁷ Pada dasarnya, Penilaian kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L diukur menggunakan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebagai indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN atas pelaksanaan DIPA dengan aplikasi Online *Monitoring* Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OM-SPAN) sebagai media untuk menyediakan perhitungan nilai IKPA dan penyediaan informasi terkait IKPA.¹⁸

2.1.2. Bobot Indikator IKPA

Pada tahun tahun 2022 terjadi perubahan teknis penilaian indikator dan pelaksanaan anggaran dengan diterbitkannya peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tanggal 18 Januari 2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementrian

¹⁶Ramadhani Herlambang Aji, “Kajian Penyusunan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada KPP Pratama Temanggung” (Skripsi, Program D3 Kebendaharaan Negara PKN Stan, 2022), h. 3.

¹⁷Dzulfadhli, bagian Seksi Verifikasi dan Akutansi, wawancara di KPPN Langsa, tanggal 12 Desember 2022.

¹⁸Teddy B. Tampubolon, “*Tinjauan Atas Hasil Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pada Kppn Medan I Tahun 2020 Dan 2021*”. (Skripsi, Program D3 Kebendaharaan Negara Pkn Stan, 2022), h. 16.

Negara/Lembaga yang mencabut Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021. Dalam aturan terakhir terdapat reformulasi indikator capaian output. Pencapaian output ini dihitung berdasarkan rasio antara kinerja produk yang dicapai dan tujuan produk yang dicapai. Selain itu, terdapat pula penyesuaian bobot 8 (delapan) indikator IKPA yang dapat diuraikan pada tabel di bawah ini.

Table 2.1. Penyesuaian Bobot 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

$\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^8 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) : \text{Konversi Bobot}$					
No.	ASPEK KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN 20%	No.	ASPEK KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN 55%	No.	ASPEK KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN 25%
1.	Revisi DIPA (10%)	1.	Penyerapan Anggaran (20%)	1.	Capaian Output 25%
2.	Deviasi Halaman III DIPA (10%)	2.	Data Kontrak (10%)		
		3.	Penyelesaian Tagihan (10%)		
		4.	Pengelolaan UP dan TUP (10%)		
		5.	Dispensasi SPM (5%)		

- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Es I/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- Konversi bobot bernilai di bawah 100% apabila pada Satker/Es I/K/L tidak terdapat data transaksi untuk Satker tertentu

Sumber: djpb.kemenkeu.go.id/

Dalam Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan tanggal Nomor PER-5/PB/2022 tanggal 18 Januari 2022 terkait Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, masing-masing indikator dapat digambarkan sebagai berikut :¹⁹

¹⁹Sapto Dwi Nurdyanto, "Pengaruh Kepatuhan Dan Pemahaman Peraturan Terhadap Kualitas Kinerja dan Pelaksanaan Anggaran APBN Satker Mitra Kerja KPPN Mamuju" dalam *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, vol.3 No.3 (Januari 2022), h. 326.

1. Penyerapan Anggaran

Penyerapan Anggaran bertujuan untuk mempercepat pengeluaran sesuai dengan menjaga pertumbuhan ekonomi. Target penyerapan anggaran melalui mekanisme pertriwulan dan bersifat kumulatif. Sementara itu, target penyerapan anggaran pertriwulannya sebagai berikut :

- 15% pada Triwulan I
- 30% pada Triwulan II
- 60% pada Triwulan III
- 90% pada Triwulan IV

Perhitungan persentase rata-rata penyerapan anggaran di atas pagu DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) didasarkan pada perbandingan daya serap anggaran dengan target penyerapan anggaran. Bobot indikatornya 20%.

2. Data Kontrak

Data kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dan pemasok dari barang/jasa, pelaksana swakelola digunakan sebagai dasar untuk mengajukan pencairan dana ke KPPN. Setelah kontrak ditandatangani, kontrak Arsip Data Komputer (ADK) harus diserahkan ke KPPN paling lambat 5 hari kerja. Bobot pengiriman data kontrak adalah 10%.

3. Penyelesaian Tagihan

Terdapat batas waktu penyelesaian tagihan berfungsi untuk mengukur tingkat kepatuhan atas waktu penyelesaian tagihan pihak ketiga. Untuk bobot penilaian IKPA penyelesaian tagihan yaitu sebesar 10% .

4. Indikator Capaian Output

Indikator Capaian Output memiliki tujuan untuk :

- a. Menyeimbangkan penyerapan anggaran dengan kinerja perolehan output.
- b. Data pencapaian output akan divalidasi oleh KPPN melalui Aplikasi Struktural Analistis Sintesis (SAS) atau Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) untuk meningkatkan kualitas data pencapaian.
- c. Kementerian/Lembaga dapat mengukur campaign kinerja dengan melakukan pengecekan secara berkala secara online pada Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) untuk mendorong peningkatan kinerja unit kerja.
- d. Hasil evaluasi capaian output dapat digunakan sebagai dasar pembuatan kebijakan, baik dalam perencanaan maupun penganggaran

dengan restrukturisasi output agar lebih terukur (*Real Work/Eye Catching*).²⁰

Adapun target PCRPP per triwulannya, yaitu :

- 15% di Triwulan I
- 40% di Triwulan II
- 60% di Triwulan III
- 100% di Triwulan IV

Bobot nilai IKPA atas capaian output sebesar 25%.

5. Pengelola UP dan TUP

Uang Persediaan (UP) diberikan kepada Satker sebagai uang muka untuk operasional sehari-hari dan diberikan dalam jumlah tertentu kepada bendahara pengeluaran dengan catatan pengeluaran ini tidak dapat dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.

Tambahan Uang Persediaan (TUP) merupakan tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran Satker dikarenakan kebutuhan yang mendesak dalam 1 bulan melebihi Pagu UP yang telah ditetapkan. Bobot indikatornya 10%.

6. Revisi DIPA

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang mendasari penggunaan anggaran dalam melaksanakan

²⁰Sapto Dwi Nurdyanto, "Pengaruh Kepatuhan Dan Pemahaman Peraturan Terhadap Kualitas Kinerja dan Pelaksanaan Anggaran APBN Satker Mitra Kerja KPPN Mamuju"h. 327.

kegiatan pemerintahan seperti pelaksanaan APBN. Revisi Anggaran merupakan perubahan anggaran yang pelaksanaannya berdasarkan APBN Tahun Anggaran 2021 dan disetujui dalam DIPA Tahun Anggaran 2021.

Indeks Revisi DIPA yang digunakan untuk menilai kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas perencanaan anggaran. Bobot penilaian indeks DIPA revisi adalah 10%.

7. Deviasi Halaman III DIPA

Target penilaian indeks ini adalah untuk mendapatkan akurasi kebutuhan dana dan mempertahankan likuiditas. Indeks ini memiliki bobot sama dengan 10%. Meskipun boleh melakukan revisi halaman III DIPA, namun tetap harus memperhatikan perencanaan alokasi anggaran awal.

8. Dispensi Surat Perintah Pembayaran (SPM)

Dispensasi penyampaian SPM merupakan dispensasi pengajuan SPM tidak sesuai batas waktu yang telah ditentukan pada ketentuan langkah-langkah akhir tahun anggaran. Dispensasi SPM diberikan oleh Kanwil DJPB atau Direktorat Pelaksanaan Anggaran sesuai ketentuan langkah-langkah akhir tahun anggaran. Jumlah SPM yang mendapat dispensasi karena melewati batas waktu penyampaian menjadi dasar penilaian indikatornya. Untuk penilaian IKPA, perhitungan dilakukan berdasarkan jumlah kumulatif SPM

yang mendapat dispensasi. Bobot nilai IKPA dari Dispensasi Penyampaian SPM sebesar 5%.²¹

2.1.3. DIPA

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN, proses penyusunan DIPA diawali dari APBN yang sudah ditetapkan dan disetujui oleh DPR, maka selanjutnya Menteri Keuangan akan memberitahukan kepada semua Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk masing-masing Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah.

Di dalam DIPA, diuraikan sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program dan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja, serta pendapatan yang diperkirakan. Setelah dibahas dan dianggap sesuai dengan APBN serta secara administrasi sudah benar maka DIPA tersebut disahkan oleh Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan Sebagai 12 Bendahara Umum Negara (BUN) yang kemudian bisa digunakan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga Pemerintah sebagai dokumen yang menjadi dasar pembiayaan kegiatan.²²

²¹ Sapto Dwi Nurdyanto, *“Pengaruh Kepatuhan Dan Pemahaman Peraturan Terhadap Kualitas Kinerja dan Pelaksanaan Anggaran APBN Satker Mitra Kerja KPPN Mamuju”*h. 329.

²²Ramadhani Herlambang Aji, *“Kajian Penyusunan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada KPP Pratama Temanggung”* (Skripsi, Program D3 Kebendaharaan Negara PKN Stan, 2022), h. 11.

2.1.4. OM SPAN

Aplikasi Online *Monitoring* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disingkat Aplikasi OM-SPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam Span dan menyajikan informasi sesuai kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis *internet*, OM SPAN dibangun dan dikelola oleh Ditjen Perbendaharaan sebagai solusi atas kebutuhan *stakeholder* Span untuk mendapatkan informasi dari *basis data Enterprise Resource Planning* (ERP) Span secara cepat, tepat, andal dan *user friendly*.

Dengan mengikuti perkembangan zaman yang serba *digital* sekarang ini, IKPA diintegrasikan pada aplikasi Online *Monitoring* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN). Dilakukannya pengintegrasian ini bertujuan agar perhitungan IKPA terotomatisasi sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, akses IKPA oleh *user* pada aplikasi OM SPAN menjadi lebih mudah karena dapat diakses kapanpun dan dimanapun secara *real time* oleh sistem elektronik.²³

Aplikasi ini hanya bisa diakses oleh penerima hak akses (*user license*) yang memiliki *user Id* dan *Password* sesuai dengan kewenangannya, yang mana artinya aplikasi ini hanya boleh digunakan oleh Kantor Pusat DJPb, Kantor Wilayah DJPb, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Satuan Kerja, dan Pihak lainnya yang memiliki kepentingan dalam Implementasi Span. Dalam menggunakan aplikasi ini

²³Teddy B. Tampubolon, "*Tinjauan Atas Hasil Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pada Kppn Medan I Tahun 2020 Dan 2021*". (Skripsi, Program D3 Kebendaharaan Negara Pkn Stan, 2022), H. 18.

Kantor Pusat DJPb tersebut menggunakan Aplikasi OM-SPAN sebagai alat monitoring dan penyediaan informasi terkait implementasi SPAN pada instansi vertical Direktorat Jendral Perbendaharaan, informasi yang disediakan dalam Aplikasi OM-SPAN ini paling kurang meliputi aplikasi manajemen pengguna aplikasi:

- a. Modul Penganggaran
- b. Modul Kas
- c. Modul Pembayaran
- d. Modul Penerimaan
- e. Modul Komitmen dan
- f. Informasi Lainnya terkait implementasi SPAN.²⁴

2.1.5. Manfaat IKPA Bagi KPPN

Indikator suatu kinerja memiliki peran penting untuk mengukur hasil kinerja suatu organisasi atau memberikan pandangan bahwa tujuan/visi misi suatu organisasi sudah sesuai dengan yang diharapkan. Kinerja adalah bentuk akuntabilitas organisasi atas wewenang yang ditujukan kepada instansi tersebut. Pengukuran kinerja dapat juga digunakan untuk mekanisme usulan anggaran yang diajukan. Penyusunan pengukuran kinerja membutuhkan proses yang sangat panjang dari mulai menentukan program hingga menentukan indikator kinerja.

²⁴ Ramadhani Herlambang Aji, *“Kajian Penyusunan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada KPP Pratama Temanggung”* (Skripsi, Program D3 Kebendaharaan Negara PKN Stan, 2022), h. 13.

Indikator kinerja suatu organisasi semestinya harus dimengerti secara *kognitif* baik oleh *stakeholders*, terutama *direct users*, karena salah satu fungsinya adalah untuk memberikan pengertian bahwa dengan adanya indikator yang maka akan membuat suatu pemahaman yang tertanam bahwa suatu pihak baik internal maupun eksternal untuk menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan program dan dalam menilai ketercapaian suatu tujuan organisasi.²⁵

Jadi dengan begitu disinilah fungsi IKPA akan menjadi pembeda, karena dengan mengukur kinerja, Pemerintah dalam ini Kementerian Keuangan telah memikirkan suatu solusi dengan suatu Indikator Kinerja yang dapat diketahui. Ketika individu atau kelompok individu tersebut dalam artian ini KPPN Langsa sebagai Mitra kerja DJPb memiliki kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan misalnya dengan nilai IKPA yang memuaskan atau kurang memuaskan.²⁶ Selain itu indikator ini akan menunjukkan suatu kriteria keberhasilan/kegagalan berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Karena jika suatu organisasi tidak memiliki tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya.

²⁵Dzulfadhli, bagian Seksi Verifikasi dan Akutansi, wawancara di KPPN Langsa, tanggal 12 Desember 2022.

²⁶Dzulfadhli, bagian Seksi Verifikasi dan Akutansi, wawancara di KPPN Langsa, tanggal 12 Desember 2022.

2.2. Kinerja

2.2.1. Pengertian Kinerja

Kinerja berasal dari kata *Job Performance* atau *Actual Performance* berasal dari Bahasa Inggris yang berarti prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dilakukan oleh seseorang. Memahami kinerja merupakan hasil kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh karyawan dalam proses pelaksanaan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.²⁷ Istilah kinerja digunakan untuk mengukur hasil yang dicapai sehubungan dengan satu atau lebih kegiatan, apakah kinerja perusahaan baik atau perlu adanya evaluasi kebelakang mengenai hasil yang dicapai. Beberapa pengertian Kinerja dari beberapa ahli,yaitu dalam kamus bahasa Indonesia biasa dikatakan bahwa kinerja adalah apa yang dicapai atau prestasi kerja yang terlihat.

Kinerja, *performance* atau prestasi kerja merupakan penampilan kerja maupun hasil yang dicapai seseorang, baik berupa barang/produk maupun dalam bentuk jasa, yang biasanya digunakan sebagai dasar penilaian diri karyawan atau organisasi kerja yang bersangkutan yang mencerminkan pengetahuan karyawan tentang pekerjaannya. Semakin tinggi kualitas dan kuantitas hasil kerjanya maka semakin tinggi kinerjanya.²⁸

Kinerja adalah bentuk akuntabilitas organisasi atas wewenang yang ditujukan kepada instansi tersebut. Pengukuran kinerja dapat juga digunakan untuk mekanisme

²⁷Muhamad Ekhsan “*Pengaruh Motivasi dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan*” dalam *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, Vol. 13, No.1 (2019), h. 3.

²⁸Akhmad Fauzi dan Rusdi Hidayat N.A.,*Manajemen Kinerja*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2020), h. 2.

usulan anggaran yang diajukan. Penyusunan pengukuran kinerja membutuhkan proses yang sangat panjang dari mulai menentukan program hingga menentukan indikator kinerja. Kinerja adalah hasil yang telah di capai oleh seseorang dalam pekerjaannya menurut kriteria yang telah di tentukan oleh dalam suatu perusahaan.²⁹

Selain itu kinerja merupakan gambaran umum tentang tingkat kinerja yang dicapai suatu kegiatan/program/kebijakan dan mencapai tujuan, sasaran, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan rencana strategis (*strategic planning*) sebuah organisasi. Ulasan lain mengatakan kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, wewenang dan tanggung jawab yang tepat, setiap orang berusaha untuk mencapai tujuannya, organisasi yang terkait secara hukum, dan bukan melanggar hukum dan bersikap sesuai moral dan etika.³⁰

2.2.2. Indikator Kinerja

Indikator kinerja merupakan deskripsi, karakteristik, atau ukuran yang menggambarkan status kinerja yang di hasilkan dari suatu kegiatan atau proses. Indikator kinerja juga merupakan pengukuran kuantitatif yang menggambarkan sejauh mana sasaran atau tujuan yang tercapai. Definisi indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dari pengertian diatas, dijelaskan bahwa

²⁹Mirna Wita, Rusdi. “Analisis Perhitungan Kinerja Dengan Mekanisme IKPA Terhadap Kepuasan dan Kinerja Satker Pada KPPN Meulaboh” dalam *Jurnal Riset Ekonomi*, Vol.1 No.3 November (2021), h. 256.

³⁰Diana Khairani Sofyan “Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Kerja Pegawai BAPPEDA” dalam *Malikussaleh Industrial Engineering Journal*, Vol. 2, No. 1, (2013), h. 19.

indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu, indikator kinerja ini nantinya akan merujuk pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang sifatnya hanya berupa suatu ciri-ciri kinerja secara mendasar, sehingga bentuknya cenderung kualitatif, seperti laporan atau misal presensi kehadiran dengan sedikit rincian.³¹

Dalam suatu organisasi atau perusahaan, keberadaan indikator kinerja berperan penting karena berpengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan.³² Indikator merupakan cara yang sangat baik untuk menentukan hasil kinerja untuk menandai bahwa hasil kinerja yang bagus dan buruk, salah satu caranya adalah dengan pengukuran kinerja, dengan indikator suatu kesuksesan organisasi dalam mencapai tujuan akan diamati dengan mudah secara empiris dari nilai yang ditunjukkan dari performa suatu organisasi/instansi tersebut yang memanfaatkan sumber daya yang dikelolanya untuk mencapai hasil sesuai dengan rencana yang telah dituangkan dalam visi misi atau tujuan organisasi tersebut dibentuk.

Selain untuk mencapai tujuan perusahaan, indikator juga bermanfaat untuk mengetahui kinerja karyawan. Tidak hanya itu, indikator tersebut juga dapat meningkatkan kinerja karyawan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan perusahaan. Maksud dari indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak adalah:

31

³² Arini T. Ssoemohadiwidjojo, *Panduan Menyusun KPI*, (Raih Asa Sukses, 2015), h. 15.

1. Indikator masukan (*Input*) merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijakan/peraturan perundang-undangan, dan sebagainya.
2. Indikator keluaran (*Output*) merupakan sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau non fisik.
3. Indikator hasil (*Outcome*) merupakan segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).
4. Indikator manfaat (*Benefit*) merupakan sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
5. Indikator dampak (*Impact*) merupakan pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif terhadap setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.³³

Indikator kinerja suatu organisasi haruslah dipahami secara menyeluruh mulai dari *staff*, pejabat instansi pemerintah (*public servants*), selain itu juga penting bagi pihak lain seperti investor, kreditur, pejabat legislatif pakar-pakar dan juga masyarakat awam dengan begitu, adanya indikator yang jelas maka akan menciptakan konsensus berbagai pihak baik internal maupun eksternal untuk

³³Indrayani, Khairunnisa, "Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Konsep Value For Money Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe" dalam *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, Vol. 6, No. 1, Februari (2018), h. 3.

menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan program dan dalam menilai keberhasilan suatu organisasi.³⁴

2.2.3. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja (*Performance Measurement*) merupakan tindakan untuk mencapai tujuan organisasi dengan menilai kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran pengelolaan sumber daya manusia yang membentuk perusahaan jasa dan barang. Adanya pengukuran kinerja dalam perusahaan diharapkan bekerja sama untuk menjalin kerja seperti pekerja berprestasi di bidangnya dan bersaing untuk berkontribusi bagi organisasi atau perusahaan. Selain dari itu, pengukuran kinerja merupakan faktor penentu dari kriteria yang telah sebelumnya didefinisikan oleh masyarakat sebagai tindak lanjut dari suatu organisasi, bagian dari organisasi dan karyawan berdasarkan tujuan, standar kinerja secara berkala.³⁵

Dalam rangka meningkatkan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) melakukan pengukuran terhadap IKPA. Pengukuran terhadap IKPA dilakukan dengan tujuan untuk melihat seberapa sesuai kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran, kegiatan tersebut dan seberapa patuh terhadap regulasi yang mengatur terkait pelaksanaan anggaran. Sedangkan, bila ditinjau dari sisi pelaksanaan monev anggaran belanja K/L, IKPA dapat dijadikan *tools* guna mengukur dan

³⁴ 4

³⁵Wakhit Ahmad Fahrudin, “Analisis Pengukuran Kinerja Menggunakan Balance Scorecard untuk Menentukan Key Performance Indicator Di PT Mulia Artha Anugerah” dalam *Jurnal Ilmiah Teknik dan Manajemen Industri*, Vol. 3, No. 1, (2020), h. 16.

membandingkan nilai kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L melalui proses pemantauan dan evaluasi kinerja.³⁶

Dalam pengukuran kinerja, manajer dan atasan dapat membuat keputusan berdasarkan kebijakan akan dilaksanakan dalam bisnis perusahaan. Penentuan keputusan penting salah satunya adalah kenaikan pangkat maupun peningkatan gaji atau penghasilan dan sebagainya, ini ditinjau dari segi internal. Jika dilihat dari segi eksternal penilaian kinerja, dapat digunakan sebagai alat pendeteksi awal untuk meramalkan kondisi perusahaan yang akan datang dan sejenis penarik investasi.

Pengukuran kinerja merupakan faktor penting dalam suatu organisasi, termasuk untuk organisasi sektor publik. Pengukuran kinerja sangat diperlukan untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan public yang lebih baik dan tepat sasaran. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk mencapai tiga tujuan. Pertama, pengukuran kinerja sektor publik untuk membantu meningkatkan kegiatan pemerintah. Kedua, pengukuran kinerja sektor publik digunakan untuk alokasi sumber daya dan pengambilan keputusan. Ketiga, pengukuran kinerja sektor publik untuk tujuan mencapai akuntabilitas publik dan meningkatkan komunikasi kelembagaan.³⁷

Pengukuran indikator kinerja memiliki tiga aspek, yaitu:

³⁶Teddy B. Tampubolon, "*Tinjauan Atas Hasil Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pada Kppn Medan I Tahun 2020 Dan 2021*". (Skripsi, Program D3 Kebendaharaan Negara Pkn Stan, 2022), h. 17.

³⁷ Indrayani, Khairunnisa, "*Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Konsep Value For Money Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe*" dalam *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, Vol. 6, No. 1, Februari (2018), h. 2.

1. Kualitas Perencanaan Anggaran, merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Mencakup, Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA.
2. Kualitas Pelaksanaan Anggaran, merupakan penilaian terhadap kemampuan satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Mencakup, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) serta Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM).
3. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran, merupakan penilaian terhadap kemampuan satker dalam pencapaian output sebagaimana ditetapkan pada DIPA. Mencakup, Capaian Output.

$$\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^8 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) : \text{Konversi Bobot}$$

No.	ASPEK KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN 20%	No.	ASPEK KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN 55%	No.	ASPEK KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN 25%
1.	Revisi DIPA (10%)	1.	Penyerapan Anggaran (20%)	1.	Capaian Output 25%
2.	Deviasi Halaman III DIPA (10%)	2.	Data Kontrak (10%)		
		3.	Penyelesaian Tagihan (10%)		
		4.	Pengelolaan UP dan TUP (10%)		
		5.	Dispensasi SPM (5%)		

- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Es I/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- Konversi bobot bernilai di bawah 100% apabila pada Satker/Es I/K/L tidak terdapat data transaksi untuk Satker tertentu

Sumber: djpb.kemenkeu.go.id/

Pada aspek diatas kita juga membaca Pengukuran aspek kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, aspek tersebut merupakan salah satu yang terpenting dan merupakan penilaian kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dana yang diperoleh satker atau DIPA dari APBN, nantinya akan digunakan untuk pembiayaan atau pengadaan barang dan jasa atau penggunaan lainnya tergantung kebutuhan satker, dari perilaku pengadaan satker nanti, kemudian akan menghasilkan nilai yang akan dikeluarkan dalam bentuk nilai IKPA satker tersebut.³⁸

³⁸Ramadhani Herlambang Aji, “Kajian Penyusunan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada KPP Pratama Temanggung” (Skripsi, Program D3 Kebendaharaan Negara PKN Stan, 2022), h. 15.

2.2.4. Penganggaran Berbasis Kinerja

Performance Based Budgeting atau yang biasa dikenal sebagai penganggaran berbasis kinerja adalah suatu metode penganggaran yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan alokasi sumber daya maupun anggaran yang dimiliki suatu instansi baik di lingkungan pemerintahan atau selain itu, konsep penganggaran ini memperkuat proses perumusan dan pengambilan keputusan kebijakan dalam jangka menengah atau panjang, dan juga meningkatkan efektivitas serta efisiensi dalam bidang belanja organisasi. Latar belakangnya dilaksanakan penganggaran ini adalah sistem penganggaran berbasis kinerja diterapkan pemerintah dalam upaya memberi tanggapan kepada tingginya tuntutan kebutuhan dari tingginya kualitas layanan publik maka dari itu efeknya akan mencapai tujuan dengan meminimalkan penggunaan yang tidak perlu dianggarkan.³⁹

Penganggaran berbasis kinerja juga berupa sistem penganggaran yang berdasarkan pada keluaran suatu organisasi yang berkaitan sangat erat dengan visi dan misi serta perencanaan strategis organisasi. Sistem penganggaran ini mengaitkan langsung antara *output* dengan *outcome* yang ingin dicapai yang disertai dengan penekanan terhadap efektifitas dan efisiensi anggaran yang dialokasikan. *Performance based budgeting* atau bisa dikenal dengan anggaran berbasis kinerja merupakan suatu cara penganggaran bagi manajemen untuk membuat setiap

³⁹Wijayanti, et. al., "Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja di Kabupaten Pasuruan." dalam *Wacana Journal of Social and Humanity Studies* Vol. 15, No. 3, (2012), h. 11.

pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan berkesinambungan atau berhubungan dengan hasil yang diharapkan supaya dicapainya efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut, keluaran/output dalam hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap *unit* kinerja.⁴⁰

Selain itu anggaran berbasis kinerja juga membuat instansi yang menerapkannya lebih mengutamakan aspek akuntabilitas pengelolaan keuangan sektor *public*, akuntabilitas ditingkatkan dengan cara mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun anggaran yang diajukan berdasarkan tingkat kinerja yang bertujuan untuk memenuhi alokasi anggaran yang diterima, dan melaporkan atas pencapaian kerjanya. Istilah akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa inggris *accountability* yang berarti adanya suatu pertanggung jawaban atau keadaan untuk dipertanggung jawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas sebagai bentuk kewajiban mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.⁴¹

⁴⁰Wijayanti, et. al., "Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja di Kabupaten Pasuruan." dalam *Wacana Journal of Social and Humanity Studies*h. h. 11.

⁴¹Ramadhani Herlambang Aji, "Kajian Penyusunan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada KPP Pratama Temanggung" (Skripsi, Program D3 Kebendaharaan Negara PKN Stan, 2022), h. 9.

2.3. Satuan Kerja (Satker)

2.3.1. Pengertian Satuan Kerja (Satker)

Satuan Kerja merupakan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.⁴² Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 190/PMK.05/2012 merupakan unit organisasi Kementerian Negara/Lembaga atau unit organisasi Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga dan memiliki wewenang serta tanggung jawab penggunaan anggaran. Satuan Kerja pada lingkungan K/L melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran melalui pengukuran kualitas kinerja menggunakan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Dalam penggunaan anggaran ditetapkan Penggunaan Anggaran (PA) yang merupakan pejabat pemegang hak penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga.⁴³

Satuan Kerja dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu:

1. Satker Pusat, merupakan satker yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan anggaran dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi kantor pusat Kementerian Negara/Lembaga yang lokasinya dapat berada di pusat atau di daerah.

⁴²Swante Adi Krisna, "Pengertian Satuan Kerja", hukum.iknusanantara.com/satuan-kerja. Diunduh 23 Juni 2022.

⁴³Badi'ul Choir, "Pelaksanaan Pembayaran Dana Gaji Sususlan Satuan Kerja Pada KPPN Kab.Banyuwangi" dalam *Laporan Praktek Kerja Nyata*, (2018), h. 10.

2. Satker/Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian/Lembaga Negara, merupakan instansi vertikal di daerah yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan anggaran dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh kantor pusat.
3. Satker Khusus, merupakan satker yang bertanggung jawab melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan program/kegiatan yang disponsori oleh Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan.
4. Satker Perangkat Daerah (SKPD), merupakan satker provinsi yang melaksanakan tugas Dekonsentrasi dan satker tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota/Desa yang melaksanakan tugas pembantuan.
5. Satker Non-Vertikal Tertentu (SNVT), merupakan satker yang bukan instansi vertikal Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan kegiatan yang dibiayai oleh alokasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
6. Satker Sementara (SKS), merupakan satker diluar pengertian bagian nomor 2 sampai dengan nomor 5, yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan yang dibiayai dari alokasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang kewenangan dan tanggung jawabnya berada pada Kementerian Negara/Lembaga terkait.⁴⁴

⁴⁴Badi'ul Choir, "Pelaksanaan Pembayaran Dana Gaji Susulan Satuan Kerja Pada KPPN Kab.Banyuwangi",.....,h. 11.

2.3.2. Pengeloaan Keuangan Satker

Satuan kerja dibentuk untuk menjalankan fungsi pemerintahan tertentu. Untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut, pemerintah mengalokasikan modal melalui mekanisme anggaran. Pengelolaan keuangan menggunakan penganggaran berbasis kinerja mulai diterapkan dalam lingkungan pemerintahan, pengelolaan keuangan kemudian dipengaruhi oleh system anggaran yang digunakan.. Dalam mekanisme ini, pengelola harus mampu menyusun rencana kerja dan anggaran (*spending framework*) yang jelas, terencana dan berkelanjutan dalam produksi pelayanan publik. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja disusun dalam satu dokumen yang mencakup rencana kegiatan satker, rencana kebutuhan dana untuk mendukung kegiatan tersebut, dan rencana/prakiraan penerimaan setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang akan diselesaikan selama periode satu tahun. Pada tahap pelaksanaan anggaran, dokumen tersebut secara resmi disusun menjadi daftar pelaksanaan anggaran.⁴⁵

2.4. Penelitian Terdahulu

Tujuan utama dari tinjauan pustaka ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara subjek yang diteliti dan penelitian sejenis yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan dalam penelusuran awal.

⁴⁵Keuangan Negara Indonesia, “*Satuan Kerja*”, keuangannegara.id/dasar-pengetahuan/satuan-kerja/ Diunduh tanggal 25 Juni 2022.

Tabel 2.4.1. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Metodologi	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Mirna Wita, Rusdi	Analisis Perhitungan Kinerja Dengan Mekanisme Ikpa Terhadap Kepuasan Dan Kinerja Satker Pada Kppn Meulaboh (2021)	Kualitatif	Penggunaan IKPA salah satu bentuk pola perubahan pemikiran bahwa kinerja pelaksanaan anggaran bukan hanya dinilai dari penyerapan anggarannya tapi juga mengingat pada saat ini banyak aspek kinerja pelaksanaan anggaran yang tersedia dalam database pelaksanaan anggaran yang relevan untuk dijadikan bahan evaluasi. Penulis dapat menguraikan tentang bahwa Satuan Kerja (Satker) puas dengan pelayanan yang diberikan oleh	Memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas penggunaan IKPA dalam pelaksanaan anggaran dan kinerja satker.	Perbedaan penelitian pada skripsi ini lebih spesifik membahas analisis perhitungan kinerja pada KPPN Meulaboh, penelitian skripsi ini juga mengambil sample di KPPN Meulaboh sedangkan penelitian selanjutnya mengambil sample di KPPN Langsa.

				pegawai KPPN Meulaboh. ⁴⁶		
2	Lesmana Chandra B., Nanang Widiatmoko,	Pengaruh Kepatuhan Satker Pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terhadap Penyaluran Dukungan Anggaran Binoplat (2019)	campuran (mix methods) sequential explanatory	Penyusunan pertanggungjawaban keuangan yang patuh pada peraturan berpengaruh terhadap kelancaran penyaluran dukungan anggaran Binoplat Sopsal. Efektivitas pelaksanaan kegiatan berpengaruh terhadap penyaluran dukungan anggaran Binoplat Sopsal. ⁴⁷	Sama-sama membahas evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran pada satuan kerja.	Penelitian pada skripsi ini menggunakan metode penelitian campuran (<i>mix methods</i>) <i>sequential explanatory</i> sedangkan penelitian selanjutnya menggunakan metode penelitian Kualitatif, pada skripsi ini melakukan penelitian pada tahun 2019 sedangkan pada penelitian selanjutnya melakukan penelitian pada tahun 2021 dan pada skripsi ini lebih spesifik membahas

⁴⁶Mirna Wita, Rusdi. "Analisis Perhitungan Kinerja Dengan Mekanisme IKPA Terhadap Kepuasan Dan Kinerja Satker Pada KPPN Meulaboh" dalam *Jurnal Riset Ekonomi*, Vol. 1, No. 3, November (2021), h. 257.

⁴⁷Lesmana Chandra B., Nanang Widiatmoko, "Pengaruh Kepatuhan Satker Pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terhadap Penyaluran Dukungan Anggaran Binoplat" dalam *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Krisnadwipayana*, Vol.7. No. 3 September-Desember (2019), h. 5.

						penyaluran dukungan anggaran Binopslat.
3	Agus Bayu Santoso	Penggunaan Informasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga	campuran (<i>mixed-method</i>) sekuensial eksplanatori	Menunjukkan bahwa faktor kelayakan desain sistem pengukuran kinerja, institusionalisasi pengukuran kinerja, dan faktor individual berpengaruh positif signifikan terhadap penggunaan informasi kinerja dan secara tidak langsung memengaruhi peningkatan kinerja pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga di Indonesia. Selain itu, peneliti menemukan adanya fenomena isomorfisme koersif dan isomorfisme normatif yang memengaruhi perilaku pegawai Satuan Kerja Kementerian/Lembaga dalam	Sama-sama membahas IKPA untuk mengukur kinerja pelaksanaan anggaran belanja seluruh Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi (PMK Nomor 195/PMK.05/2018).	Perbedaan terdapat pada skripsi ini lebih spesifik membahas faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan informasi kinerja dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi pemerintah pusat.

				mencapai target kinerja yang tertuang dalam Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). ⁴⁸		
4	Muhammad Fahmi Trisnadi	Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Poso (Studi Kasus)	Regresi linear berganda	Kinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja KPPN Poso disebabkan oleh 12 faktor dengan memiliki variasi sebesar 98,20%, sedangkan sisanya sebesar 1,80% dijelaskan oleh faktor lain. ⁴⁹	Sama-sama membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan anggaran pada satuan kerja KPPN	Perbedaan terdapat pada skripsi sebelumnya lebih spesifik membahas faktor yang paling dominan mempengaruhi kinerja pelaksanaan anggaran pada satuan KPPN Poso, sedangkan penelitian selanjutnya membahas bagaimana penggunaan IKPA dan faktor yang mempengaruhi penggunaan IKPA dalam mengukur

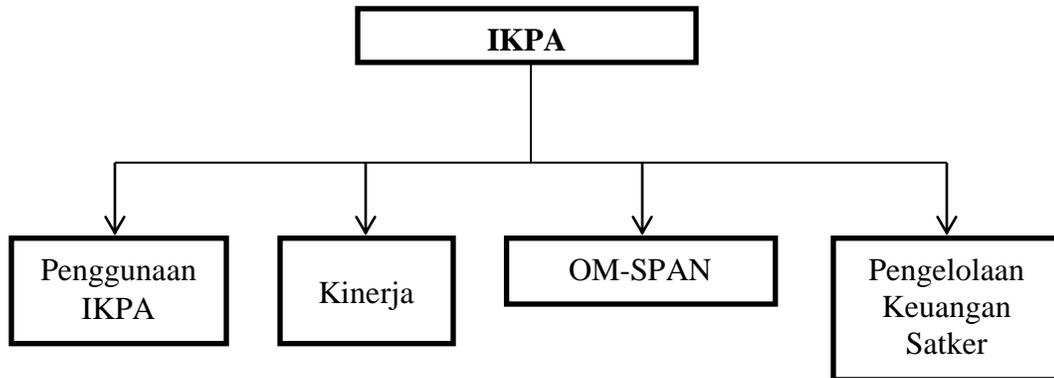
⁴⁸Agus Bayu Santoso, "Penggunaan Informasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga" dalam *Accounting and Business Information Systems Journal*, Vol. 9, No. 4, (2021), h. 11.

⁴⁹Trisnadi, Muhammad Fahmi, "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pada Satuan Kerja KPPN Poso" (Tesis, Program Pascasarjana Universitas Sintuwu Maroso, 2020).

						kinerja pengelolaan keuangan Satuan Kerja (Satker) di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Langsa
5	Sapto Dwi Nurdyanto	Pengaruh Kepatuhan Dan Pemahaman Peraturan Terhadap Kualitas Kinerja Dan Pelaksanaan Anggaran APBN Satker Mitra Kerja KPPN Mamuju	Kualitatif	Tingkat kepatuhan satuan kerja dan tingkat pemahaman terhadap kualitas kinerja dan pelaksanaan APBN kemampuan satuan kerja dalam mematuhi regulasi yang ada berdasarkan data menunjukkan bahwa kepatuhan dan pemahaman satuan kerja berpengaruh dan signifikan hasil ini sejalan dengan penelitian. ⁵⁰	Sama-sama bertumpang kepada IKPA sebagai alat ukur indikator kualitas kinerja satker dan sama-sama menggunakan metodologi penelitian kualitatif.	Perbedaan skripsi sebelumnya lebih dominan membahas Kepatuhan dan Pemahaman satker terhadap kualitas kinerja dan pelaksanaan APBN.

⁵⁰ Sapto Dwi Nurdyanto, "Pengaruh Kepatuhan Dan Pemahaman Peraturan Terhadap Kualitas Kinerja Dan Pelaksanaan Anggaran APBN Satker Mitra Kerja KPPN Mamuju" dalam *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, Vol. 3, No. 3, (Januari 2022), h. 331.

2.5. Kerangka Teoritis



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang akan menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁵¹ Penelitian kualitatif juga merupakan penelitian yang berusaha memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara utuh dan melalui uraian dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dalam konteks alamiah tertentu dan memanfaatkan berbagai metode ilmiah yang berbeda.

Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan subjek atau instansi yang akan diteliti, terutama yang berkaitan dengan Penggunaan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sebagai Sarana Pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja (Satker) Di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Langsa, dan dengan menggunakan pendekatan kualitatif diharapkan dapat diungkapkan situasi dan permasalahan yang dihadapi.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang berada di Kota Langsa, Aceh tepatnya di jalan Jendral Ahmad Yani nomor 2. Kota Langsa memiliki luas 262,41 Km² dengan letak geografis 04o24'35.68'' – 04o33'47.03'' Lintang Utara 97o53'14.59'' – 98o04'42.16'' Bujur

⁵¹Moleong J. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), h. 3.

Timur. Kegiatan penelitian ini dilakukan pada tanggal 12 bulan Desember tahun 2022 sampai dengan selesai.

3.3. Subjek Penelitian

Dilihat dari subjeknya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah penelitian dengan metode untuk menggambarkan suatu hasil suatu penelitian.⁵² Dalam hal ini, peneliti menggambarkan semua fenomena yang terjadi yaitu penggunaan IKPA sebagai sarana pengukuran kinerja pengelolaan satuan kerja berdasarkan lokasi yang diteliti.

3.4. Sumber Data Penelitian

Data adalah sesuatu yang diperoleh melalui suatu metode pengumpulan data yang akan diolah dan dianalisis dengan metode tertentu, kemudian akan menghasilkan suatu hal yang menggambarkan sesuatu berdasarkan sifatnya, penelitian ini menggunakan data kualitatif, yaitu tampilan yang berupa kata-kata dalam bentuk tulis yang dicermati oleh peneliti. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Data primer merupakan data-data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dilokasi/objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara langsung narasumber dari Satuan Kerja (Satker) dan KPPN Langsa yang terkait dalam penggunaan IKPA sebagai sarana pengukuran kinerja pengelolaan keuangan satker.

⁵² Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), h. 7.

Data sekunder dalam penelitian kualitatif dapat berupa buku harian, arsip-arsip pengelola wisata dan pemerintah, buku, jurnal penelitian dari peneliti sebelumnya dan lain sebagainya. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari *website* resmi Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) secara online.

3.5. Instrumen Pengumpulan Bahan

Instrumen pengumpulan bahan adalah pedoman tertulis tentang wawancara dan observasi, atau daftar pertanyaan yang disiapkan un tuk pengumpulan informasi. Instrumen pengumpulan bahan disebut disebut pedoman observasi atau pedoman wawancara atau panduan kuesioner atau dokumentasi, sesuai dengan metode yang dipergunakan.

Instrumen pengumpulan bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

3.5.1. Metode Wawancara

Wawancara adalah komunikasi anantara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka, dimana salah satu pihak berperan sebagai *interviewer* dan pihak lainnya berperan sebagai *interviewee* dengan tujuan tertentu, misalnya untuk mendapatkan informasi atau mengumpulkan data. *Interviewer* menanyakan sejumlah pertanyaan kepada *interviewee* untuk mendapatkan jawaban.⁵³

Wawancara dilakukan secara mendalam dan tidak terstruktur kepada subjek penelitian dengan pedoman yang telah dibuat. Teknik wawancara digunakan untuk mengungkapkan data tentang bagaimana penggunaan IKPA sebagai sarana

⁵³Fadhallah, *Wawancara*, (Jakarta Timur: UNJ Press, 2020), h. 2.

pengukuran kinerja pengelolaan keuangan satuan kerja serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.5.2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan mencari data berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, presentasi, agenda, dan lainnya. Dokumentasi juga merupakan suatu metode pengumpulan data melalui dokumen tertulis, terutama berupa arsip dan termasuk buku-buku pendapat dan argumen yang berkaitan dengan masalah penelitian.

3.5.3. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan terhadap objek penelitian. Dalam hal ini observasi melakukan pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti dengan maksud melihat, mengamati, kemudian memahami pengetahuan dan gagasan yang diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian.⁵⁴ Kemudian dibuat catatan tentang penggunaan IKPA sebagai sarana pengukuran kinerja pengelola keuangan satker yang dilakukan pada KPPN Langsa.

3.6. Analisis data

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan lebih banyak hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dan diuraikan dalam bentuk deskriptif. Analisis data sebagai bagian dari

⁵⁴Subandi, “*Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan*” dalam *Jurnal Harmonian*, vol. 11, No.2, (Surakarta, Desember 2011), h.176.

upaya sistematis untuk menemukan dan mengatur catatan hasil observasi, wawancara dan hasil lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan orang lain. Sementara itu, untuk meningkatkan pemahaman tersebut, analisis harus diupayakan dengan mencoba untuk mencari makna.⁵⁵

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data diartikan sebagai proses memilih, memfokuskan pada penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, penulisan kode, penggambaran topik, membuat gugus, penulisan memo, dan sebagainya dengan tujuan menghapus data/informasi yang tidak relevan.

3. Data tampilan (*Display Data*)

Data tampilan adalah deskripsi dari sekumpulan informasi terstruktur yang memberikan kemampuan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan.

⁵⁵Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif” dalam *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol.17 No.33 Januari – Juni 2018, h. 84.

Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajiannya juga dapat berupa matriks, diagram, tabel, dan grafik.

4. Kesimpulan Menarik dan Memverifikasi (*Conclusion Drawing And Verification*)

Ini merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa interpretasi yaitu menemukan makna dari data yang disajikan. Antara tampilan data dan menarik kesimpulan, terdapat aktivitas analisis data. Analisis data kualitatif adalah upaya yang berkelanjutan, berulang, dan berkelanjutan. Masalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan menjadi gambaran keberhasilan yang berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang terkait.

BAB VI

HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1. Sejarah Singkat KPPN Langsa

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Langsa adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan tipe A1 yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh. KPPN Langsa mulai aktif beroperasi tanggal 01 Maret 1969 dengan nama Kantor Bendahara Negara (KBN). Kemudian pada tanggal 1 April 1975 melalui Keputusan Menteri Keuangan No.KEP-405/MK/6/4/75 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, Kantor Bendahara Negara diubah menjadi Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) dan Kantor Kas Negara (KKN), bersamaan dengan itu dibentuk juga Kantor Wilayah.⁵⁶

Seiring berjalannya waktu dan kebutuhan organisasi maka KPN dan KKN digabung menjadi Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN), berdasarkan SK Menteri Keuangan tanggal 12 Juni 1989 No.645/KMK.01/1989. Penggabungan ini dilakukan dengan mengenalkan pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) yaitu pelayanan kepada masyarakat yang semula dilakukan oleh 2 (dua) kantor cukup dilaksanakan oleh 1 (satu) kantor. Pada masa KPKN ini terjadi perubahan beban kerja, dimana sebagian tugas KPKN dialihkan ke PT. Taspen

⁵⁶ Sejara KPPN Langsa dijpb.kemenkeu.go.id/kppn/langsa/id/ Diunduh tanggal 17 Desember 2022.

dan Perum Asabri, serta pembayaran melalui sistem perbankan. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.303/KMK.01/2004 tanggal 23 Juni 2004 menetapkan perubahan nama Kantor Pelayanan Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) menjadi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang hingga saat ini tersebar di seluruh Indonesia.

4.1.2. Visi, Misi, Dan Tujuan KPPN Langsa

a. Visi

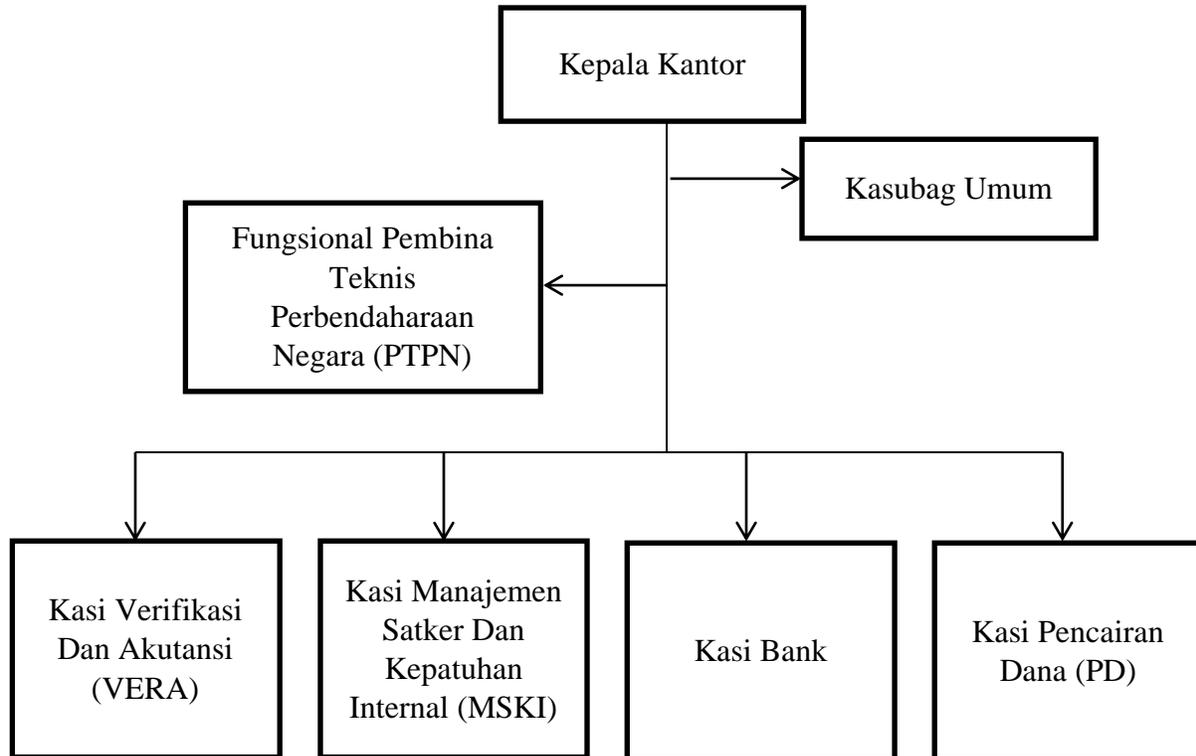
Mewujudkan Pengelolaan Perbendaharaan Negara yang Profesional, Transparan dan Akuntabel dalam Wilayah Kerja KPPN Langsa Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh.

b. Misi

1. Menjamin Kelancaran Pencairan Dana APBN
2. Menatausahakan Penerimaan Negara Secara Profesional
3. Mewujudkan Pelaporan Pertanggungjawaban APBN Secara Akurat⁵⁷

⁵⁷ Visi, Misi, Dan Tujuan KPPN Langsa djp.kemenkeu.go.id/kppn/langsa/id/ Diunduh tanggal 17 Desember 2022.

4.1.3. Struktur Organisasi KPPN Langsa



- 1 Pejabat Administrator (Kepala Kantor/Eselon III.A)
- 5 Pejabat Pengawas, 1 Pejabat Fungsional
- 12 Pelaksana.⁵⁸

Dengan struktur organisasi tersebut, masing masing sub bagian memiliki tugas dan kepentingan yang saling berintegrasi supaya dapat mencapai tujuan yang terdapat pada visi dan misi KPPN Langsa, berikut fungsi sub bagian pada KPPN Langsa:

⁵⁸Struktur Organisasi KPPN Langsa dijpb.kemenkeu.go.id/kppn/langsa/id/ Diunduh tanggal 17 Desember 2022.

1. Kepala Kantor

- a. Menyelenggarakan penatausahaan dokumen pelaksanaan anggaran.
- b. Menyelenggarakan pengujian Surat Perintah Membayar (SPM) dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana, (SP2D) atas nama Menteri Keuangan
- c. Menyelenggarakan pelaksanaan penilaian dan pengesahan terhadap Uang Persediaan (UP).
- d. Menyelenggarakan pengembalian pendapatan
- e. Menyelenggarakan dan mengawasi penyelesaian Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP).
- f. Menyelenggarakan pelaksanaan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari rekening kas negara.
- g. Menyelenggarakan persusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.
- h. Menyelenggarakan penyusunan rencana pemantauan pengendalian internal di lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- i. Menyelenggarakan pelaksanaan pemantauan pengendalian *intern* dan kepatuhan kode etik dan disiplin pegawai.
- j. Mengkoordinasikan penyusunan rekomendasi hasil pemantauan pengendalian *intern* di lingkungan KPPN.

- k. Mengkoordinasikan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemantauan pengendalian *intern* dan kepatuhan kode etik dan disiplin pegawai di lingkungan KPPN.
- l. Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan risiko pada KPPN
- m. Menyelenggarakan pemantauan standar kualitas layanan KPPN.

2. Sub Bagian Umum

- a. Melakukan urusan kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Melakukan urusan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Melakukan urusan rumah tangga sesuai ketentuan yang berlaku..
- d. Penatausahaan *user* Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (SPAN) dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) untuk keperluan layanan KPPN.
- e. Mengkoordinasikan penghapusan arsip sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. Melakukan penyusunan laporan penyerapan keuangan KPPN.
- g. Melakukan urusan kehumasan pada KPPN.
- h. Melakukan koordinasi pelaporan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tingkat KPPN.⁵⁹

3. Seksi VERA

- a. Menyiapkan bahan masukan penyusunan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, PK dan LAKIP, RKA-KL KPPN Khusus Investasi.

⁵⁹ Tugas dan Fungsi KPPN Langsa djp.kemenkeu.go.id/kppn/langsa/id/ Diunduh tanggal 17 Desember 2022.

- b. Mempelajari Renstra, Renja, RKA-K/L, RKT, PK dan LAKIP KPPN Khusus Investasi tahun lalu dan tahun berjalan.
- c. Membahas konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKA-K/L, RKT, PK dan LAKIP KPPN Khusus Investasi bersama Pelaksana.
- d. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan IKU tingkat Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal.
- e. Melakukan pembahasan dengan pihak-pihak terkait dalam rangka persiapan penyusunan.
- f. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep IKU tingkat Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal sesuai hasil pembahasan beserta konsep nota dinasnya.
- g. Meneliti dan memeriksa konsep IKU tingkat Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal beserta konsep not dinasnya.
- h. Menyampaikan konsep IKU tingkat Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal berikut konsep nota dinasnya kepada Kepala KPPN Khusus Investasi.
- i. Menugaskan Pelaksana untuk melakukan verifikasi kewajiban penerusan pinjaman luar negeri, penerusan pinjaman dan pendanaan lainnya.
- j. Menelaah hasil verifikasi kewajiban penerusan pinjaman luar negeri, penerusan pinjaman dan pendanaan lainnya.

- k. Menyusun hasil verifikasi penerusan pinjaman luar negeri, penerusan pinjaman dan pendanaan lainnya.
- l. Menyampaikan hasil verifikasi penerusan pinjaman luar negeri, penerusan pinjaman dan pembiayaan lainnya kepada Seksi Setelmen Investasi I atau Seksi Setelmen Investasi II.
- m. Melakukan pengendalian internal terhadap akurasi data kewajiban.

4. Seksi MSKI

- a. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan perbendaharaan.
- b. Fungsi customer service.
- c. Supervisi teknis SPAN dan helpdesk SAKTI.
- d. Pemantauan standar kualitas layanan KPPN dan penyediaan layanan perbendaharaan.
- e. Tugas dibidang Kepatuhan Internal.
- f. Pemantauan pengendalian inter, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin dan tindak lanjut hasil pengawasan.
- g. Perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.⁶⁰

5. Seksi Bank

- a. Melakukan penyelesaian transaksi pencairan dana dan penatausahaaanya.
- b. Menerbitkan SPM Pengembalian Pendapatan akibat Kesalahan perekaman penerimaan oleh Bank/Pos Persepsi atau Pengembalian penerimaan non

⁶⁰ Tugas dan Fungsi KPPN Langsa djp.kemenkeu.go.id/kppn/langsa/id/ Diunduh tanggal 17 Desember 2022.

anggaran akibat kelebihan pelimpahan Bank/Pos Persepsi ke BO I/III/Bank Indonesia Tahun Anggaran berjalan.

- c. Melakukan proses Pengembalian Pendapatan akibat kesalahan perekaman penerimaan oleh Bank/Pos Persepsi atau Pengembalian penerimaan non anggaran akibat kelebihan pelimpahan Bank/Pos Persepsi ke BO I/III/Bank Indonesia Tahun Anggaran Yang Lalu ke kantor pusat (Direktorat Pengelolaan Kas Negara).
- d. Menerbitkan konsep SKP4 untuk proses pembayaran kembali dana retur SP2D yang telah disetor ke kas negara.
- e. Menerbitkan Surat Ketetapan Pembagian Dana Bagi Hasil PBB.
- f. Menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran DBH PBB.
- g. Menerbitkan Surat Permohonan Transfer DBH PBB
- h. Menerbitkan Surat Perintah Transfer DBH PBB.
- i. Melakukan penatausahaan penerimaan negara melalui potongan SPM, Bank Persepsi, Bank Devisa Persepsi dan Pos Persepsi.
- j. Melakukan penyusunan Laporan Kas Posisi (LKP).
- k. Melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Bendahara Umum.
- l. Melakukan penyusunan Laporan Penerimaan dan Pembagian PBB.
- m. Melakukan pembukuan atas penerimaan dan pembagian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari Bank Operasional III (BO III).

- n. Pengelolaan rekening milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.

6. Seksi Pencairan Dana

- a. Melakukan penatausahaan dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai dasar pembayaran.
- b. Meneliti DIPA/dokumen lain yang dipersamakan.
- c. Menugaskan pelaksana untuk memantau revisi DIPA yang berasal dari DJA, Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan satker itu sendiri.
- d. Menyimpan dokumen-dokumen hasil cetak dari aplikasi (DIPA/dokumen anggaran yang dipersamakan) tersebut dengan baik dan api.
- e. Melakukan pengujian terhadap data supplier.
- f. Memantau pelaksana dalam melakukan review data supplier.
- g. Melakukan pengujian data supplier yang telah diperiksa oleh pelaksana.
- h. Memberi penolakan data supplier ketika ada duplikasi atau kesalahan pada data.
- i. Memberikan persetujuan data supplier untuk menghasilkan Nomor Register Supplier (NRS).
- j. Menugaskan pelaksana untuk menyampaikan Nomor Register Supplier (NRS) kepada satker.⁶¹

⁶¹ Tugas dan Fungsi KPPN Langsa djpb.kemenkeu.go.id/kppn/langsa/id/ Diunduh tanggal 17 Desember 2022.

4.1.4. Uraian Tugas dan Fungsi Tanggungjawab

Sesuai dengan [PMK Nomor 2/62/PMK.01/2016](#) tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 Langsa mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN), penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 Langsa menyelenggarakan fungsi:

- Pengujian terhadap surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kas negara atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN);
- Penyaluran pembiayaan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari Kas Negara;
- Penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
- Pelaksanaan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi serta pertanggung jawaban bendahara;
- Pembinaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

- Pelaksanaan tugas kepatuhan internal;
- Pelaksanaan manajemen mutulayanan;
- Pelaksanaan manajemen hubungan pengguna layanan (customer relationship management);
- Pelaksanaan tugas dan penyusunan laporan Pembina Pengelola Perbendaharaan (treasury management representative);
- Pelaksanaan dukungan penyelenggaraan sertifikasi bendahara;
- Pengelolaan rencana penarikan dana;
- Pengelolaan rekening pemerintah;
- Pelaksanaan fasilitasi Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Daerah;
- Pelaksanaan layanan bantuan (helpdesk) penerimaan negara;
- Pelaksanaan sistema kuntabilitas dan kinerja;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Kredit Program;
- Pelaksanaan Kehumasan dan layanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP);
dan
- Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).⁶²

⁶² Tugas dan Fungsi KPPN Langsa dijpb.kemenkeu.go.id/kppn/langsa/id/ Diunduh tanggal 17 Desember 2022.

4.2. Penggunaan IKPA Sebagai Sarana Pengukuran Kinerja Pengelola Keuangan Satker di KPPN Lagsa

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap kualitas pelaksanaan anggaran, kualitas perencanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.⁶³ IKPA merupakan salah satu alat untuk mengukur kinerja pelaksanaan anggaran, sehingga perhitungan dan penilaian IKPA harus akurat, transparan, dan akuntabel.

Penggunaan IKPA digunakan sebagai bahan monitoring untuk kualitas pelaksanaan anggaran, kualitas perencanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Penggunaan IKPA juga merupakan salah satu bentuk pola perubahan pemikiran tentang implementasi kinerja anggaran, tidak hanya ulasan dari penyerapan anggaran, tetapi juga berpikir saat ini banyak anggaran pelaksanaan yang tersedia dalam wadah informasi pelaksanaan anggaran yang relevan untuk dijadikan bahan evaluasi.

Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Waskita Fitri Ayuni selaku Kepala Seksi Verifikasi dan Akutansi (VERA), beliau mengatakan:

“Penggunaan IKPA sendiri untuk kami sangat penting dan sangat membantu dalam mengukur kinerja para satker, tentunya penting bagi setiap instansi.

⁶³ Lesmana Chandra B., Nanang Widiatmoko, “Pengaruh Kepatuhan Satker Pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terhadap Penyaluran Dukungan Anggaran Binoplat” dalam *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Krisnadwipayana*, Vol.7. No. 3 September-Desember (2019), h. 2.

Untuk penggunaannya sendiri kami mengakses melalui Aplikasi OM-SPAN atau *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara*.⁶⁴

Penggunaan IKPA salah satu bentuk perkembangan aspirasi yang berpemahaman suatu kinerja pelaksanaan anggaran bukan hanya dinilai dari penyerapan anggarannya melihat perkembangan teknologi saat ini banyak sekor kinerja pelaksanaan anggaran yang tersedia dalam *database* pelaksanaan anggaran yang relevan untuk dijadikan indikator yang berguna untuk evaluasi kinerja. Alat *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran telah disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Aplikasi OM-SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas pelaksanaan anggaran, kualitas perencanaan anggran, dan kualitas asil pelaksanaan anggaran. Selanjutnya beliau juga menyampaikan, bahwa:

“Penggunaan IKPA memang berkaitan dengan Aplikas OM-SPAN karena kita mengukur kualitas kinerja satker dalam pengelolaan keuangan dari aplikasi tersebut, apakah sudah sesuai dengan ketiga aspek indikator apa belum dan sudah mencapai bobotnya atau belum. Jadi setiap instansi, kita diberikan *usern*nya untuk mengakses Aplikas OM-SPAN ini. Nah, dengan begitu kita bisa meliat kinerja kinerja para satker ini pekerjaannya seperti apa”⁶⁵

Para satker biasanya menilai pengukuran IKPA secara manual, akan tetapi semakin berkembangnya teknoligi sekarang ini, mereka tidak lagi menghitung secara manual, namun menggunakan aplikasi agar lebih mudah dan cepat. Di Kementerian Keuangan ada satu instansi yg mengurus aplikasi, mereka membentuk suatu aplikasi

⁶⁴Wakista Fitri A., Kepala Seksi Verifikasi dan Akutansi, wawancara di KPPN Langsa, tanggal 15 Desember 2022.

⁶⁵Wakista Fitri A., Kepala Seksi Verifikasi dan Akutansi, wawancara di KPPN Langsa, tanggal 15 Desember 2022.

tersebut dengan nama OM SPAN, OM SPAN sendiri hanya bisa diakses oleh satker yg sudah terdaftar di Kementerian Keuangan yang penggunaannya dari APBN. Aplikasi OM-SPAN dapat diakses pada alamat web spanint.kemenkeu.go.id pada browser di komputer/laptop/smartphone yang tersambung dengan jaringan internet.⁶⁶

Sama seperti yang dikatakan oleh Bapak Ahmad Sultan Fauzi bagian dari Kasubag Umum, beliau menjelaskan:

“Di Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) ada namanya aplikasi SPAN, untuk memantau kinerja pengelolaan keuangan satker bisa dilihat dari Aplikasi OM SPAN. Aplikasi ini untuk memantau/memonitoring kinerja keuangan satker, aplikasi ini lengkap menjelaskan kinerja keuangan satker, termasuk dalam aplikasi ini ada IKPA. Dan kenapa berkaitan dengan IKPA karena aplikasi ini digunakan untuk melihat nilai ikpa satker.”⁶⁷

Nilai IKPA merupakan kesesuaian kualitas pelaksanaan anggaran, kualitas perencanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Indikator nilai ikpa tahun 2022 terdapat 8 indikator. Nilai IKPA diberlakukan dari DIPA berlaku secara efektif sampai akhir tahun anggaran. Nilai IKPA Satuan Kerja (satker) diberikan pada aplikasi OM-SPAN, perhitungannya di berlakukan secara otomatis pada data dari aplikasi pengelolaan Keuangan satker. Pimpinan kantor bisa memantau secara periodik lewat OM-SPAN masing-masing satker pada menu monev anggaran pelaksanaan, nilai IKPA diterbitkan pada tahunan. Akan tetapi, kepala kantor juga dapat melihat perkembangan pada setiap saat kegiatan yang ada di kantornya. Dengan penggunaan IKPA, terintegrasinya data IKPA pada OM-SPAN dan pelaksanaan

⁶⁶Ahmad Sultan Fauzi, bagian dari Kasubag Umum, wawancara di KPPN Langsa, tanggal 15 Desember 2022.

⁶⁷Ahmad Sultan Fauzi, bagian dari Kasubag Umum, wawancara di KPPN Langsa, tanggal 15 Desember 2022.

monev secara periodic, maka akan sangat efektif dalam mengukur hasil kinerja dari KPPN Langsa sendiri.

Maka dari itu peran indikator suatu kinerja yang dilakukan pada Kementerian/Lembaga akan berperan penting untuk memberi informasi kepada pimpinan atau atasan lembaga, dengan demikian, tanpa adanya indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai tingkat keberhasilan dan ketidakberhasilan suatu program atau kinerja yang dilakukan oleh Satuan Kerja.⁶⁸

4.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan IKPA Sebagai Sarana Pengukuran Kinerja Pengelola Keuangan Satker di KPPN Lagsa

Dalam mengukur kualitas kinerja pengelolaan keuangan satker, pasti setiap instansi memiliki kendalanya masing-masing. Pengawasan pengelolaan kinerja keuangan yang meliputi nilai IKPA dipengaruhi oleh kualitas pelaksanaan anggaran, kualitas perencanaan anggran, dan kualitas asil pelaksanaan anggaran.⁶⁹ Adapun elemen yang mempengaruhi nilai IKPA adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Uang Persediaan (Up) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP).

Uang Persediaan (Up) minimal diputar satu bulan sekali atau dapat juga dilakukan berkali-kali dan tidak boleh terlambat, sedangkan pengelolaan

⁶⁸ Ramadhani Herlambang Aji, “Kajian Penyusunan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada KPP Pratama Temanggung” (Skripsi, Program D3 Kebendaharaan Negara PKN Stan, 2022), h. 49.

⁶⁹Wakista Fitri A., Kepala Seksi Verifikasi dan Akutansi, wawancara di KPPN Langsa, tanggal 15 Desember 2022.

Tambahan Uang Persediaan (TUP) dipertanggungjawabkan satu bulan sesuai dengan surat pernyataan dan tidak ada sisa yang dikembalikan/diseter.

2. Menyampaikan data kontrak secara tepat waktu (Maksimal 5 hari kerja setelah kontrak ditanda tangani sudah dicatat di buku pengawasan Kontrak di KPPN).
3. Kesalahan SPM yang diakibatkan kurang telitian, sehingga tidak dapat di proses oleh sistem KPPN. (Kesalahan pengajuan SPM mengurangi nilai IKPA)
4. Retur SP2D yang diakibatkan kesalahan penulisan rekening/rekening tidak aktif (Pengembalian SPM karena salah menulis rekening penerima mengurangi nilai IKPA).
5. Halaman III DIPA untuk meningkatkan akurasi pelaksanaan sesuai dengan perencanaan (sesuai rencana penarikan).
6. Revisi DIPA, dapat melakukan revisi secara efektif (Makin sering revisi DIPA makin rendah nilai IKPA).

Penulis juga bertanya kepada Ibu Waskita Fitri Ayuni selaku Kepala Seksi Verifikasi dan Akutansi (VERA), terkait Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penggunaan IKPA sebagai sarana pengukuran kinerja pengelola keuangan satker di KPPN Langsa, beliau menjelaskan:

“Faktornya masih berkaitan dengan 8 indikator ini, ke-8 indikator ini harus saling mendukung, dan ke-8 indikator tersebut harus tercapai sesuai bobotnya. Kalau dalam semester/triwulan ada yang tidak sesuai dengan bobotnya maka itu menjadi faktor kami agar tahun berikutnya lebih ditingkatkan lagi.”⁷⁰

Selanjutnya terkait wawancara, penulis juga bertanya kepada Ibu Waskita Fitri Ayuni selaku Kepala Seksi Verifikasi dan Akutansi (VERA) tentang masalah-masalah penggunaan IKPA sebagai sarana pengukuran kinerja pengelola keuangan satker di KPPN Lagsa, beliau menjelaskan bahwa:

“Masalah-masalah nya bisa dilihat dalam aplikasi OM-SPAN, di OM-SPAN sendiri kita bisa melihat dari 8 indikator tersebut, salah satunya seperti Uang Persediaan (UP), kapan masa berlakunya, kapan jatuh temponya.”⁷¹

Untuk mengatasi permasalahan dan menaikkan nilai IKPA perlu adanya kesungguhan dan komitmen dari pimpinan untuk selalu mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan yang berpegang teguh terhadap peraturan yang berlaku, antara lain dengan melakukan hal –hal sebagai berikut :

1. Setiap hari membuka OM SPAN dan menu Monev Pelaksanaan Anggaran dan melihat elemen apa yang harus dilaksanakan dan perlu diperbaiki.
2. Meningkatkan sinergi antar pejabat pengelola perbendaharaan, sehingga ada kesamaan pandangan dan mempunyai keinginan untuk meningkatkan nilai IKPA satuan kerja yang bersangkutan.

⁷⁰ Wakista Fitri A., Kepala Seksi Verifikasi dan Akutansi, wawancara di KPPN Lagsa, tanggal 15 Desember 2022.

⁷¹ Wakista Fitri A., Kepala Seksi Verifikasi dan Akutansi, wawancara di KPPN Lagsa, tanggal 15 Desember 2022.

3. Menjalankan fungsi pengawasan sebaik mungkin baik yang dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM, dan Bendahara Pengeluaran.
4. Melakukan konfirmasi rekening ke Bank yang dituju untuk cek ulang apakah rekening tersebut masih aktif atau tidak aktif, hal ini perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya retur SP2D.
5. Pejabat Penandatanganan SPM harus lebih cermat terhadap perubahan nama dalam rekening dan dirubah juga nama di Bank Pembayar dan di KPPN.

Dalam wawancara kepada Ibu Waskita terkait Penggunaan IKPA , dari KPPN Langsa sendiri memiliki kemajuan yang luar biasa setiap tahunnya.

“Tentu saja di KPPN Langsa ada kemajuan dari tahun ketahun yang luar biasa. Karena satkernya juga mendukung, sebab kinerja masing-masing pegawai dalam pengelolaan keuangan dinilai dari pergerakan tercapainya bobot IKPA.”⁷²

Penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu *system*/metode penganggaran yang diterapkan oleh management suatu organisasi dalam rangka memberikan korelasi pada setiap pemasukan dan pengeluaran dari segi pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan *output* dan *outcome* yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian tersebut, *output* dan *outcome* yang dimaksud berasal dari target kinerja atau biasa dikenal dengan visi misi yang telah dibuat pada setiap unit kinerja. Dari pengertian diatas bisa dikaitkan IKPA sebagai salah satu

⁷² Wakista Fitri A., Kepala Seksi Verifikasi dan Akutansi, wawancara di KPPN Langsa, tanggal 15 Desember 2022.

penanda bahwa hasil kinerja yang menunjukkan bahwa implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja telah di laksanakan dengan baik atau belum pada lingkungan Kementerian Keuangan, maka dengan mengetahui seberapa baik implementasi penganggaran berbasis kinerja dengan melihat nilai IKPA pada tahun 2020, 2021 dan 2022 KPPN Langsa.

Gambar 4.3.1. Nilai IKPA KPPN Langsa tahun 2021

7021

IKPA TINGKAT KPPN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Periode	Kode KPPN	Nama KPPN	Keterangan	Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan			Kepatuhan Terhadap Regulasi				Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan				Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan		Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
					Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Pagu Minus	Data Kontrak	Pengelolaan UP dan TUP	LPJ Bendahara	Dispensasi SPM	Penyerapan Anggaran	Penyelesaian Tagihan	Capaian Output	Retur SP2D	Renkas	Kesalahan SPM			
1	12	002	LAN GSA	Nilai	100	84.31	95.41	96	94	96.97	95	100	99.02	88.29	99.14	0	85	89.82	95%	94.55
				Bobot	5	5	5	10	8	5	5	15	10	17	5	0	5			
				Nilai Akhir	5.00	4.22	4.77	9.60	7.52	4.85	4.75	15.00	9.90	15.01	4.96	0.00	4.25			
				Nilai Aspek	93.24			95.49				96.61				85.00				
Disclaimer:					Sesuai PER-4/PIB/2021, untuk periode Triwulan I TA 2021 tidak dilakukan penilaian IKPA untuk indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Capaian Output															

Sumber: KPPN Langsa

Di tahun 2020, nilai IKPA didapatkan melalui proses perhitungan terhadap 13 indikator yang menjadi dasar dalam penilaian nilai akhir IKPA. Perlu diketahui, bahwa indikator dan bobot dalam penilaian IKPA kerap mengalami perubahan, hal

tersebut dilakukan dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan dalam penilaian kinerja pelaksanaan anggaran.

Berdasarkan pengkategorian nilai IKPA pada PER-4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga pasal 23 Nilai IKPA DJA tahun 2020 termasuk dalam kategori baik dan nilai IKPA KPPN Langsa pada tahun 2021 dikategorikan baik karena memiliki nilai IKPA 89,82. Nilai akhir IKPA secara keseluruhan menjadi 94,55 hal ini merupakan sebuah reward yang baik bagi KPPN Langsa dalam menerapkan *system* penganggaran berbasis kinerja, namun yang perlu dilihat adalah terdapat angka 0 juga pada indikator renkas.

Nilai diatas didapatkan karena penyampaian kebutuhan atas pencairan dana melalui RPD harian yang terlambat atau tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan akibat dampak covid-19, maka terdapat akun untuk belanja keperluan mencegah covid-19 yang menimbulkan akun baru, hal ini akan menyebabkan proses pencairan dana tersebut kemungkinan terlambat, seperti yang dijelaskan oleh bapak Dzufadhli bagian dari Kasi VERA,

“iya, hal ini terjadi karena covid-19 mempengaruhi belanja dan anggaran satker pada KPPN Langsa, namun lebih baik apabila pengeluaran dan belanja dapat direncanakan lebih awal, karena satker pada umumnya melakukan belanja besar besaran pada triwulan ke III karena mungkin sisa anggaran yang banyak, hal itu akan mempengaruhi nilai IKPA juga karena realisasi anggaran yang bisa saja tidak sesuai dengan RPD bulanan.”⁷³

⁷³Dzufadhli, bagian Seksi Verifikasi dan Akutansi, wawancara di KPPN Langsa, tanggal 12 Desember 2022.

Namun ada penyebab lain yang dapat menyebabkan nihilnya nilai renkas ialah ketentuan dari penilaian karena dijelaskan indikator renkas itu sendiri yakni transaksi pada indikator perencanaan kas hanya ditujukan untuk transaksi yang memiliki saldo lebih dari atau sebesar Rp 1 M sehingga transaksi yang memiliki nilai di bawah Rp 1 M tidak digolongkan dalam indikator ini.

Gambar 4.3.2. Nilai IKPA KPPN Langsa tahun 2022

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KPPN LANGSA

Sampai Dengan : NOPEMBER

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

No	Kode ES1	Nama ES1	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)	
				Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output				
1	002	LANGSA	Nilai	100.00	76.96										
			Bobot	10	10	92.27	94.01	98.11	98.19	100.00	99.41				
			Nilai Akhir	10.00	7.70	20	10	10	10	5	25				
			Nilai Aspek		88.48	18.45	9.40	9.81	9.82	5.00	24.85				
Disclaimer:						96.52									
Sesuai Perdirjen Perbendaharaan PER-5/PB/2022, Indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022															
											95.03	100%	95.03		
											99.41				

Sumber: KPPN Langsa.

Pada tahun 2022 ada perubahan dalam penilaian dan bobot indikator IKPA, yang mana pada tahun sebelumnya memiliki 13 indikator namun pada tahun 2022 menjadi 8 indikator. Hal ini disebabkan mengalami perubahan formula atau reformulasi. Latar belakang reformulasi IKPA adalah untuk mendukung belanja berkualitas dengan penguatan *value for money* dalam penilaian kinerja, mendorong

akselerasi belanja dan pencapaian *output* belanja serta untuk menetapkan derajat kewajaran (*fairness treatment*) dalam penilaian kinerja pada Satker, Eselon I, dan K/L. Ada 5 indikator tahun 2021 yang tidak diperhitungkan lagi yaitu Pagu Minus, LPJ Bendahara, Retur SP2D, Kesalahan SPM dan Perencanaan Kas (Renkas). Namun demikian perhitungan tahun 2022 menjadi lebih detail sesuai dengan tujuannya untuk mengukur kinerja pelaksanaan anggaran belanja yang lebih berkualitas.⁷⁴

Seperti yang sudah terdata pada tabel diatas bahwa ada kemajuan penilaian IKPA KPPN Langsa. Terdapat nilai yang menurun dan ada juga yang meningkat, namun bobot pada indikatornya juga mengalami perubahan dari masing-masing indikator tersebut. Berdasarkan pengkategorian nilai IKPA pada KPPN Langsa pada tahun 2022 dikategorikan sangat baik karena memiliki nilai akhir 95,03. Hal ini menjadi kemajuan yang luar biasa bagi KPPN Langsa sendiri dalam pengukuran kinerja pengelolaan keuangan satker.

KPPN Langsa juga sering membuat Gugus Kendali Mutu (GKM), mengikuti sosialisasi dan mengikuti undangan satker, guna nya untuk meningkatkan kinerja para pegawai serta menambah ilmu.⁷⁵ Perhitungan nilai IKPA dilakukan melalui aplikasi OM-SPAN, penilaian ini dilakukan secara elektronik dan terintegrasi berdasarkan data yang berasal dari transaksi keuangan satker. Nilai IKPA

⁷⁴Dzulfadhli, bagian Seksi Verifikasi dan Akutansi, wawancara di KPPN Langsa, tanggal 12 Desember 2022.

⁷⁵Ahmad Sultan Fauzi, bagian dari Kasubag Umum, wawancara di KPPN Langsa, tanggal 15 Desember 2022.

dikategorikan menjadi beberapa kategori yang akan didapat dari penjumlahan nilai setiap indikator sesuai dengan bobot masing-masing indikator nilai IKPA.

- Sangat baik, apabila nilai IKPA ≥ 95
- Baik, apabila nilai IKPA < 95
- Cukup, apabila ≤ 70 nilai IKPA < 89
- Kurang, apabila nilai IKPA < 70

Sarana pemberian informasi IKPA yang tertera pada Aplikasi OM-SPAN yang di khususkan pada DJPb sebagai Kuas BUN sebagaimana dijelaskan sesuai dengan ayat

(3) huruf B berdasarkan tingkat pengguna dengan *user* adalah:

1. IKPA Tingkat Satker melalui *user* KPPN
2. IKPA Tingkat Wilayah melalui *user* Kanwil DJPb dan
3. IKPA Tingkat K/L melalui *user* DJPb

Informasi IKPA pada Aplikasi OM-SPAN terdiri dari, Penyediaan informasi IKPA bagi K/L dan Penyediaan informasi IKPA bagi DJPb Sebagai Kuasa BUN.

Selanjutnya beliau juga menyampaikan, bahwa:

“Penilaian IKPA itu ada yang persemster ada juga yang pertriwulan, oleh karena itu setiap masing-masing instansi mengejar nilai IKPA nya. Ke-8 indikator ini saling berkaitan untuk menaikkan nilai IKPA nya. Nah, jika persemster/pertriwulan ada yang tidak mencapai bobotnya. Tahun depan harus ditingkatkan lagi, oleh sebab itu peran pentingnya ada di Eselon I. Eselon I nya harus mendukung agar pergerakan IKPA nya jadi cepat, jika dari Eselon I tidak ada pergerakan maka dari satker juga mengalami kesulitan/kendala dalam mengelola keuangan.”⁷⁶

⁷⁶ Wakista Fitri A., Kepala Seksi Verifikasi dan Akutansi, wawancara di KPPN Langsa, tanggal 15 Desember 2022.

Semua negara ingin memiliki kinerja pengelolaan keuangan yang baik demi tercapainya akuntabilitas pengelolaan kekayaan negara, apalagi dalam penggunaan anggaran negara, dana yang akan digunakan untuk alokasi harus sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja yang terdapat pada satuan kerja pada kementerian/lembaga, sesuai dengan pernyataan yang terdapat pada fungsi satuan kerja (satker) adalah sebagai instansi pada kementerian atau lembaga yang menjalankan suatu Program yang didalamnya berisi kegiatankegiatan dan memiliki kewenangan penggunaan anggaran.⁷⁷

Dengan demikian yang menjadi faktor mempengaruhi penggunaan IKPA akan mendapat nilai yang baik dari indikator yang sudah memenuhi/tercapai sesuai bobotnya, dan penyerapan anggaran akan sesuai dengan yang diharapkan. Keuntungan yang akan diperoleh dengan membuka OM SPAN setiap hari Pimpinan akan mengetahui proses penyelesaian SPM dan realisasi anggaran di Satuan Kerjanya, termasuk dapat memantau IKPA dan apabila terdapat elemen IKPA yang rendah dapat mengkomunikasikan dengan pengelola keuangan Satuan Kerja. Keuntungan lain yang akan diperoleh dengan selalu membuka OM SPAN kesalahan akan cepat diketahui sedini mungkin, dan sarana bagi Pimpinan untuk mengontrol pengelolaan keuangan di Satkernya.

⁷⁷Ramadhani Herlambang Aji, "*Kajian Penyusunan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada KPP Pratama Temanggung*" (Skripsi, Program D3 Kebendaharaan Negara PKN Stan, 2022), h. 2.

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan dari penelitian diatas maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Penggunaan IKPA sebagai sarana pengukur kinerja pengelola keuangan satker di KPPN Langsa juga sangat penting dan membantu dalam mengukur kinerja para satker dengan baik. Untuk penggunaa IKPA bisa diakses melalui Aplikasi *Online Monitoring* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN). Aplikasi ini hanya bisa di akses oleh satker yang sudah terdaftar di Kemenkeu.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan IKPA sebagai sarana pengukuran kinerja pengelolaan keuangan satker di KPPN Langsa juga masih berkaitan dengan 8 indikator, ke-8 indikator ini harus tercapai sesuai bobotnya. Penilaiannya dilakukan persemester/triwulan. Dan yg menjadi faktor KPPN Langsa dalam penggunaan IKPA sendiri saat nilai IKPA ke-8 indikator tersebut tidak mencapai bobotnya.

5.2. SARAN

Pimpinan KPPN Langsa harus sering-sering membuka/memantau/monitoring Aplikasi OM-SPAN agar lebih cepat teratasi apabila pengguna IKPA terdapat elemen yang rendah dan tidak sesuai dengan bobot IKPA nya, dan Pimpinan akan lebih cepat

mengetahui proses penyelesaian SPM dan realisasi anggaran di Satuan Kerjanya. Termasuk dapat memantau penggunaan IKPA apabila terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pengukuran kinerja pengelola keuangan satker.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggita, Wenni. *Pengaruh Analisis Standar Belanja, Standar Pelayanan Minimal dan Indikator Kinerja Terhadap Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang)*. *Accountthink: Journal of Accounting and Finance*, Vol. 2, No. 1, 2017.
- Buana, Lesmana Chandra Widiatmoko, Nanang. *Pengaruh Kepatuhan Satker Pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terhadap Penyaluran Dukungan Anggaran Binoplat*. *Jurnal Manajemen Bisnis Krisnadwipayana*, Vol. 7, No. 3, 2019.
- Choir, B. *Pelaksanaan Pembayaran Dana Gaji Susulan Satuan Kerja Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kab. Banyuwangi*. 2018.
- Ekhsan, Muhamad. *Pengaruh Motivasi dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan*. *Optimal: Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, Vol. 13, No. 1, 2019.
- Fadhallah, *Wawancara*. UNJ Press, 2021.
- Fahrudin, Wakhit Ahmad. *Analisis Pengukuran Kinerja Menggunakan Balance Scorecard Untuk Menentukan Key Performance Indicator Di Pt Mulia Artha Anugerah*. *JITMI: Jurnal Ilmiah Teknik dan Manajemen Industri*, Vol. 3, No. 1, 2020.
- Ikhwan R., Hidayati N., “*Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau*.” dalam *Kutubkhanah: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*., Vol. 19, No. 1, Januari-Juni 2016.
- Indrayani, Khairunnisa. *Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Konsep Value For Money Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe (Studi Kasus Pada DPKAD Kota Lhokseumawe Periode 2014-2016)*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 6, No. 1, 2018.
- Kusuma, Ruli Indra. *Mengelminasi Kelaziman Permasalahan Anggaran Dengan IKPA*. 2021.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Nanda, R., Darwanis. *Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Daerah (Studi Deskriptif Pada Dinas DPKKD Kabupaten Aceh Selatan)*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, Vol. 1, No. 1, 2016.
- Nurdyanto, Supto Dwi. *Pengaruh Kepatuhan dan Pemahaman Peraturan Terhadap Kualitas Kinerja dan Pelaksanaan Anggaran APBN Satker Mitra Kerja*

- KPPN Mamuju*. Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi, Vol. 3, No. 3, 2022.
- Ramadhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara, 2021.
- Ramadhani, Herlambang Aji, *Kajian Penyusunan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pada KPP Pratama Temanggung*. (KTTA thesis, Politeknik Keuangan Negara STAN, 2022).
- Resiloy, Unique Desyre A (ed.) *Pengelompokan Satuan Kerja Provinsi Maluku Berdasarkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Menggunakan Analisis Cluster K-Means (Studi Kasus: Kppn Ambon Tahun 2021)*. *VARIANCE: Journal of Statistics and Its Applications*, Vol. 3, No. 2, 2021.
- Rijali, Ahmad. *Analisis Data Kualitatif*. Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 17, No. 33, 2019.
- Santoso, Agus Bayu. *Penggunaan Informasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga*. *Accounting and Business Information Systems Journal*, Vol. 9, No. 4, 2021.
- Sodikin, S. *Analisis Pengukuran Kinerja Pelaksanaan Anggaran Menggunakan IKPA*. *JENTRE: Journal of Education, Administration, Training and Religion*, Vol. 2, No. 2, 2021.
- Soemohadiwidjojo, Arini T. *Panduan Praktis Menyusun KPI*. Raih Asa Sukses, 2015.
- Sofyan, Diana Khairani. *Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Kerja Pegawai BAPPEDA*. *Industrial Engineering Journal*, Vol. 2 No. 1, 2013.
- Subandi, "Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan" *Harmonian Journal of Arts Research and Education*. Vol. 11, No.2, 2011.
- Tampubolon, Teddy Benedictus. *Tinjauan Atas Hasil Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pada Kppn Medan I Tahun 2020 Dan 2021*. Diss. Politeknik Keuangan Negara Stan, 2022.
- Trisnadi, Muhammad Fahmi. *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pada Satuan Kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Poso*. Diss. Universitas Sintuwu Maroso, 2020.
- Wijayanti,et.,al., "Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja di Kabupaten Pasuruan." *Wacana Journal of Social and Humanity Studies* Vol. 15, No. 3, 2012.
- Wita, Mirna. *Analisis Perhitungan Kinerja Dengan Mekanisme IKPA Terhadap Kepuasan dan Kinerja Satker Pada KPPN Meulaboh*. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, Vol. 1, No. 3, 2021.

TRANSKIP WAWANCARA

Nama Penelitian	Wakista Fitri Ayuni
Judul Penelitian	Penggunaan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sebagai Sarana Pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja (Studi Kasus Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Langsa)
Lokasi Penelitian	KPPN Langsa

Pertanyaan	Jawaban
Bagaimana penggunaan IKPA dalam mengukur kinerja pengelolaan keuangan satker di KPPN Langsa?	Penggunaan IKPA sendiri untuk kami sangat penting dan sangat membantu dalam mengukur kinerja para satker, tentunya penting bagi setiap instansi. Untuk penggunaannya sendiri kami mengakses melalui Aplikasi OM-SPAN atau <i>Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara</i>
Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penggunaan IKPA dalam mengukur kinerja pengelolaan keuangan satker di KPPN Langsa?	Faktornya masih berkaitan dengan 8 indikator ini, ke-8 indikator ini harus saling mendukung, dan ke-8 indikator tersebut harus tercapai sesuai bobotnya. Kalau dalam semester/triwulan ada yang tidak sesuai dengan bobotnya maka itu menjadi faktor kami agar tahun berikutnya lebih ditingkatkan lagi.
Apakah ada kemajuan dalam penggunaan IKPA dalam mengukur kinerja pengelolaan keuangan satker di KPPN Langsa dari tahun ke tahun?	Tentu saja di KPPN Langsa ada kemajuan dari tahun ketahun yang luar biasa. Karena satkernya juga mendukung, sebab kinerja masing-masing pegawai dalam pengelolaan keuangan dinilai dari pergerakan tercapainya bobot IKPA

<p>Apa kaitannya IKPA dengan Aplikasi OM-SPAN</p>	<p>Penggunaan IKPA memang berkaitan dengan Aplikasi OM-SPAN karena kita mengukur kualitas kinerja satker dalam pengelolaan keuangan dari aplikasi tersebut, apakah sudah sesuai dengan ketiga aspek indikator apa belum dan sudah mencapai bobotnya atau belum. Jadi setiap instansi, kita diberikan <i>usern</i>nya untuk mengakses Aplikasi OM-SPAN ini. Nah, dengan begitu kita bisa melihat kinerja para satker ini pekerjaannya seperti apa</p>
<p>Berapa indikator penilaian IKPA berdasarkan peraturan yang berlaku pada tahun 2022 ini</p>	<p>Untuk peraturan terbaru pada tahun ini kita menggunakan 8 indikator.</p>
<p>Bagaimana cara melakukan kinerja pegawai KPPN Langsa sehingga dapat menghasilkan kualitas kinerja yang baik?</p>	<p>KPPN Langsa juga sering membuat Gugus Kendali Mutu (GKM), mengikuti sosialisasi dan mengikuti undangan satker, guna nya untuk meningkatkan kinerja para pegawai serta menambah ilmu.</p>

Nama Penelitian	Dzulfadhli
Judul Penelitian	Penggunaan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sebagai Sarana Pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja (Studi Kasus Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Langsa)
Lokasi Penelitian	KPPN Langsa

Pertanyaan	Jawaban
Bagaimana penggunaan IKPA dalam mengukur kinerja pengelolaan keuangan satker di KPPN Langsa?	Untuk penggunaannya mengakses melalui Aplikasi OM-SPAN atau <i>Online Monitoring</i> Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara,
Apa yang menyebabkan nilai IKPA pada tahun 2021 lebih rendah dibanding tahun 2022?	iya, hal ini terjadi karena covid-19 mempengaruhi belanja dan anggaran satker pada KPPN Langsa, namun lebih baik apabila pengeluaran dan belanja dapat direncanakan lebih awal, karena satker pada umumnya melakukan belanja besar besaran pada triwulan ke III karena mungkin sisa anggaran yang banyak, hal itu akan mempengaruhi nilai IKPA juga karena realisasi anggaran yang bisa saja tidak sesuai dengan RPD bulanan.
Apakah ada kemajuan dalam penggunaan IKPA dalam mengukur kinerja pengelolaan keuangan satker di KPPN Langsa dari tahun ke tahun?	Ada, karena satkernya juga mendukung, sebab kinerja masing-masing pegawai dalam pengelolaan keuangan dinilai dari pergerakan tercapainya bobot IKPA
Apa kaitannya IKPA dengan Aplikasi OM-SPAN	Penggunaan IKPA memang berkaitan dengan Aplikas OM-

	<p>SPAN karena kita mengukur kualitas kinerja satker dalam pengelolaan keuangan dari aplikasi tersebut, apakah sudah sesuai dengan ketiga aspek indikator apa belum dan sudah mencapai bobotnya atau belum. Jadi setiap instansi, kita diberikan <i>usern</i>nya untuk mengakses Aplikasi OM-SPAN ini. Nah, dengan begitu kita bisa melihat kinerja kinerja para satker ini pekerjaannya seperti apa.</p>
<p>Bagaimana cara melakukan kinerja pegawai KPPN Langsa sehingga dapat menghasilkan kualitas kinerja yang baik?</p>	<p>KPPN Langsa juga sering membuat Gugus Kendali Mutu (GKM), mengikuti sosialisasi dan mengikuti undangan satker, guna nya untuk meningkatkan kinerja para pegawai serta menambah ilmu.</p>

Nama Penelitian	Ahmad Sultan Fauzi
Judul Penelitian	Penggunaan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sebagai Sarana Pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja (Studi Kasus Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Langsa)
Lokasi Penelitian	KPPN Langsa

Pertanyaan	Jawaban
Apa yang menyebabkan nilai IKPA pada tahun 2021 lebih rendah dibanding tahun 2022?	iya, hal ini terjadi karena covid-19 mempengaruhi belanja dan anggaran satker pada KPPN Langsa, namun lebih baik apabila pengeluaran dan belanja dapat direncanakan lebih awal, karena satker pada umumnya melakukan belanja besar besaran pada triwulan ke III karena mungkin sisa anggaran yang banyak, hal itu akan mempengaruhi nilai IKPA juga karena realisasi anggaran yang bisa saja tidak sesuai dengan RPD bulanan.
Apakah ada kemajuan dalam penggunaan IKPA dalam mengukur kinerja pengelolaan keuangan satker di KPPN Langsa dari tahun ke tahun?	Ada, karena satkernya juga mendukung, sebab kinerja masing-masing pegawai dalam pengelolaan keuangan dinilai dari pergerakan tercapainya bobot IKPA.
Bagaimana penggunaan IKPA dalam mengukur kinerja pengelolaan keuangan satker di KPPN Langsa?	Untuk penggunaannya mengakses melalui Aplikasi OM-SPAN atau <i>Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara</i> .
Apa kaitannya IKPA dengan Aplikasi OM-SPAN	Di Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) ada namanya aplikasi SPAN, untuk memantau kinerja pengelolaan

	<p>keuangan satker bisa dilihat dari Aplikasi OM SPAN. Aplikasi ini untuk memantau/memonitoring kinerja keuangan satker, aplikasi ini lengkap menjelaskan kinerja keuangan satker, termasuk dalam aplikasi ini ada IKPA. Dan kenapa berkaitan dengan IKPA karena aplikasi ini digunakan untuk melihat nilai ikpa satker.</p>
<p>Bagaimana cara melakukan kinerja pegawai KPPN Langsa sehingga dapat menghasilkan kualitas kinerja yang baik?</p>	<p>KPPN Langsa juga sering membuat Gugus Kendali Mutu (GKM), mengikuti sosialisasi dan mengikuti undangan satker, guna nya untuk meningkatkan kinerja para pegawai serta menambah ilmu.</p>

Lampiran 2

Wawancara dan Dokumentasi bersama Bapak Dzulfadhli bagian dari Seksi VERA
pada tanggal 12 Desember 2022



Wawancara dan Dokumentasi bersama Ibu Waskita Fitri Ayuni selaku Kepala Seksi
VERA pada tanggal 15 Desember 2022



Wawancara dan Dokumentasi bersama Bapak Ahmad Sultan Fauzi, bagian dari Kasubag Umum pada tanggal 15 Desember 2022



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 504 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk kelancaran penyusunan skripsi mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa maka dipandang perlu untuk menetapkan Dosen Pembimbing skripsi;
- b. bahwa personil yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk ditetapkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi sebagaimana dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa tentang Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 376 Tahun 2009 tentang Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/17201, tanggal 24 April 2019, tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 140 Tahun 2019, tanggal 09 Mei 2019, tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan pada Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2019-2023;

Memperhatikan: Hasil Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tanggal 13 Oktober 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PRODI EKONOMI SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

Kesatu : Menetapkan **Zikriatul Ulya, M.Si.** sebagai Pembimbing I dan **Ade Fadillah FW Pospos, MA** sebagai Pembimbing II untuk penulisan skripsi mahasiswa atas nama **Sheila Dwi Tiara NIM 4022018018** dengan judul skripsi "**Penggunaan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sebagai Sarana Pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja (Satker) (Studi Kasus Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Langsa)**";

Kedua : Masa pembimbingan dilakukan maksimal selama enam bulan, dengan ketentuan :

1. setiap bimbingan harus mengisi Lembar Konsultasi yang tersedia;
2. perubahan judul skripsi tidak diperkenankan kecuali atas persetujuan Ketua Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa;
3. selama melaksanakan tugas ini kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada IAIN Langsa;

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di Langsa
Pada tanggal 03 November 2022 M
09 Rabiul Tsani 1444 H



Tembusan :

1. Ketua Jurusan/Prodi Ekonomi Syariah FEBI IAIN Langsa;
2. Pembimbing I dan II;



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Kampus IAIN Langsa, Jln. Meurandeh - Kota Langsa, Provinsi Aceh, Telp. 0641-22619/23129
Fax. 0641-425139 website : <http://www.febi.iainlangsa.ac.id> email : febi@iainlangsa.ac.id

Nomor : B-1207/In.24/FEBI/PP.00.9/10/2021
Lampiran : -
Perihal : **Mohon Izin Untuk Survei Awal**

Kepada Yth,
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Langsa
Di -
Tempat

Assalamu`alaikum Wr. Wb.,

Dengan hormat,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Langsa dengan ini memaklumkan kepada Bapak/Ibu bahwa mahasiswa kami
yang tersebut di bawah ini :

Nama : Sheila Dwi Tiara
Tempat / Tanggal Lahir : Kota Langsa, 30 Agustus 2000
Nomor Induk Mahasiswa : 4022018018
Jurusan : Ekonomi Syariah

Bermaksud mengadakan penelitian di wilayah Bapak/Ibu, sehubungan dengan
penyusunan skripsi berjudul "Pengaruh Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
(IKPA) sebagai Sarana Pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan Satker di
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Langsa".

Untuk kelancaran penelitian dimaksud kami mengharapkan kepada Bapak/ibu
berkenan memberikan bantuan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, segala biaya penelitian dimaksud ditanggung yang bersangkutan.

Demikian harapan kami atas bantuan serta perhatian Bapak/ibu kami ucapkan
terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Langsa, 05 Oktober 2021





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. Meurandeh – Kota Langsa – Aceh, Telepon (0641) 22619 – 23129; Faksimili (0641) 425139;
Website: www.febi.iainlangsa.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B/852/In.24/LAB/PP.00.9.01/2023

Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri

Langsa menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

NAMA : Sheila Dwi Tiara
NIM : 4022018018
PROGRAM STUDI : Ekonomi Syariah
JUDUL SKRIPSI : Penggunaan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sebagai Sarana Pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja (Satker) (Studi kasus Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Langsa)

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi kurang dari 35% pada naskah skripsi yang disusun. Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti sidang munaqasyah.

Langsa, 10 Januari 2023
Kepala Laboratorium FEBI

NIDN. 2013078701

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Sheila Dwi Tiara
Tempat, Tanggal Lahir : Langsa, 30 Agustus 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Jln.Tengku Yahya, Toriq A, Paya Bujok Tunong,
Lorong C, Langsa.
No. Telp : 0812 6061 2069
Email : sheiladwitiara30@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

2006 – 2012 : SD Negeri 1 Paya Bujok Tunong
2012 – 2015 : SMP Negeri 2 Langsa
2015 - 2018 : SMK Negeri 1 Langsa
2018 - 2023 : Jurusan Elkonomi Syariah Fakultas FEBI
IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa